

LAPORAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING SEMESTER I TAHUN 2023

DISUSUN OLEH
SATGAS STUNTING PROVINSI JAMBI

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, laporan Percepatan Penurunan Stunting (PPS) Semester 1 Tahun 2023 telah berhasil disusun. Dengan diterbitkannya laporan ini, diharapkan menjadi bahan evaluasi kita untuk meningkatkan capaian indikator yang belum optimal pada semester 1 tahun 2023 dan semester 2 Tahun 2023 baik untuk indikator layanan spesifik, indikator layanan sensitif, indikator Pilar 1 sampai Pilar 5 maupun indikator RAN-PASTI.

Memahami bahwa percepatan penurunan stunting hanya bisa berhasil bila dilaksanakan oleh multi pihak dan multi sektor pada semua tingkatan, maka Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi selaku Sekretaris Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jambi, sejak awal telah berupaya menggalang berbagai potensi organisasi profesi, organisasi keagamaan, civitas akademika dengan akademisi dan para mahasiswa, pihak swasta, media, kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah (*Pentahelix*) secara bersama-sama melakukan konvergensi secara sinergis dalam merencanakan, melaksanakan intervensi sensitif dan spesifik, pemantauan, monitoring dan evaluasi bersama secara periodik dan berkala.

Mencermati capaian indikator pada semester 1 tahun 2023 memberikan harapan dan optimisme untuk mencapai target Tahun 2023 menuju target 12% Tahun 2024 sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi. Mengingat waktu yang tersisa sangat singkat untuk mencapai target tersebut, maka pada paruh waktu Tahun 2023 ini, intervensi yang dilakukan harus lebih fokus pada sasaran Keluarga Berisiko Stunting (KRS) guna mencegah atau setidaknya mengurangi potensi kelahiran anak stunting yang baru.

Pada kesempatan yang berharga ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak, yang telah mencurahkan pikiran dan gagasannya dalam menyusun laporan Percepatan Penurunan Stunting semester 1 Tahun 2023 ini. Kami berharap, semoga laporan ini bermanfaat bagi upaya besar kita untuk menurunkan angka stunting di Indonesia umumnya dan di Provinsi Jambi khususnya.

Kota Jambi, Juli 2023

Sekretaris TPPS Provinsi Jambi,
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi



Dr. Munawar Ibrahim, S.Kp. MPH.

KATA SAMBUTAN

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan hidayah-Nya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting (PPS) Semester 1 tahun 2023 telah selesai disusun. Laporan ini merupakan gambaran penyelenggaraan PPS Semester 1 tahun 2023 yang dilaksanakan secara konvergen oleh Kementerian/Lembaga, TNI-POLRI, Pemerintah Daerah dengan dukungan dan partisipasi aktif dari Swasta, Akademisi, Media, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, serta masyarakat luas. Hasil pelaksanaan seluruh kegiatan tercermin dalam capaian indikator layanan intervensi spesifik, layanan intervensi sensitif, maupun indikator Strategi Nasional (Stranas) yang tertuang dalam Pilar 1 sampai Pilar 5 serta indikator Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN-PASTI).

Pemerintah Indonesia berkomitmen penuh dalam mencegah dan menanggulangi stunting dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas guna menyongsong puncak bonus demografi pada tahun 2030. Salah satu wujud komitmen Pemerintah adalah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang menetapkan target pada tahun 2024 sebesar 14 persen. Dalam Perpres tersebut juga ditekankan bahwa fokus pendekatan intervensi adalah pada keluarga berisiko stunting, tidak hanya pada balita stunting.

Dengan kekuatan mekanisme penyelenggaraan tersebut, maka target 14 persen tahun 2024 optimis dapat kita capai bersama. Saya berharap seluruh unsur *Pentahelix* untuk berkolaborasi dan berkoordinasi dalam meningkatkan intensitas pelaksanaan program percepatan penurunan stunting secara menyeluruh, berkelanjutan, dan dipastikan sampai kepada sasaran, yaitu keluarga berisiko stunting.

Secara khusus, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh anggota TPPS Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan pelaksanaan percepatan penurunan stunting semester pertama tahun 2023. Semoga seluruh sumbangsuhnya dapat memberikan manfaat dalam mewujudkan percepatan penurunan stunting untuk generasi Indonesia yang sehat, cerdas dan berkualitas. Aamiin.

Kota Jambi, Juli 2023
Ketua TPPS Provinsi Jambi,
Wakil Gubernur Jambi


Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
KATA SAMBUTAN	3
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GRAFIK	7
BAB I PENDAHULUAN.....	9
BAB II CAPAIAN TARGET ANTARA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI PROVINSI JAMBI.....	13
2.1 Layanan Intervensi Spesifik.....	13
2.2 Layanan Intervensi Sensitif	22
BAB III CAPAIAN PILAR STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING PROVINSI JAMBI.....	33
3.1 Pilar 1. Peningkatan Komitmen dan Visi Kepemimpinan.....	34
3.2 Pilar 2. Peningkatan Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP) dan Pemberdayaan Masyarakat.....	36
3.3 Pilar 3. Peningkatan Konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.....	40
3.4 Pilar 4. Peningkatan Ketahanan Pangan dan Gizi pada Tingkat Individu, Keluarga, dan Masyarakat	45
3.5 Penguatan dan Pengembangan Sistem Data, Informasi, Riset, dan Inovasi.....	47
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN	52
4.1 Mini Lokakarya Kecamatan.....	52
4.2 Audit Kasus Stunting	53
4.3 Pendampingan Tim Pendamping Keluarga (TPK).....	54
a. Pendampingan calon pengantin	54
b. Pendampingan ibu hamil.....	56
c. Pendampingan ibu pascasalin	56
d. Pendampingan Bayi (0-28 Hari)	57
e. Pendampingan Baduta (>28 Hari-23 Bulan)	58
4.4 Bapak Asuh Anak Stunting.....	58
4.5 Aksi Konvergensi	59
4.6 Pemberian Makanan Tambahan (PMT).....	60
BAB V PENGANGGARAN.....	61

5.1 Penganggaran APBD Provinsi Jambi	61
5.2 Penganggaran APBD Kabupaten Kota.....	61
5.3 Dukungan Kebijakan	62
BAB VI INOVASI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING	64
BAB VII PENUTUP.....	89
7.1 Kesimpulan	89
7.2 Rekomendasi	89

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Capaian Kegiatan Mini Lokakarya Kecamatan	52
Tabel 4.2 Capaian Kegiatan Audit Kasus Stunting	53
Tabel 4.3 Program PMT Balita Gizi Kurang dan Bumil KEK.....	60
Tabel 5.1 Dukungan Anggaran Pemerintah Provinsi Jambi Dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2022 dan 2023	61
Tabel 5.2 Rincian Anggaran Percepatan Penurunan Stunting melalui APBD Kabupaten/Kota	62
Tabel 6.1 Inovasi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi.....	64

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Angka Prevalensi dan Target Penurunan Prevalensi Stunting di Provinsi Jambi	10
Grafik 1.2 Data Capaian Kunjungan Posyandu dan Kejadian Stunting di Provinsi Jambi Periode Agustus 2022 dan Februari 2023	11
Grafik 1.3 Trend Persentase Data Keluarga Berisiko Stunting Provinsi Jambi 2021-2022 ..	11
Grafik 2.1 Capaian Indikator Layanan Intervensi Spesifik Provinsi Jambi.....	14
Grafik 2.2 Capaian Indikator Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang Mendapatkan Tambahan Asupan Gizi.....	15
Grafik 2.3 Capaian Kabupaten/Kota Terhadap Indikator Persentase Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	16
Grafik 2.4 Capaian Kabupaten/Kota terhadap Indikator Persentase Remaja Putri yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	17
Grafik 2.5 Capaian Kabupaten/Kota Terhadap Indikator Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 bulan Mendapat Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif	17
Grafik 2.6 Capaian Kabupaten/Kota Terhadap Indikator Persentase Anak Usia 6-23 Bulan yang Mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)	18
Grafik 2.7 Capaian Kabupaten/Kota Terhadap Indikator Persentase Anak Berusia dibawah Lima Tahun (Balita) Gizi Buruk Mendapat Pelayanan Tata Laksana Gizi Buruk	19
Grafik 2.8 Capaian kabupaten/kota terhadap indikator persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	20
Grafik 2.9 Capaian kabupaten/kota terhadap indikator persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi	21
Grafik 2.10 Capaian kabupaten/kota terhadap indikator persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap	22
Grafik 2.11 Capaian kabupaten/kota terhadap indikator persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap	23
Grafik 2.12 Capaian Pelayanan KB Pasca Persalinan (KBPP).....	24
Grafik 2.13 Capaian kabupaten/kota Terhadap Indikator Persentase Kehamilan tidak diinginkan berdasarkan kabupaten/kota	25
Grafik 2.14 Capaian kabupaten/kota Terhadap Indikator Persentase Kehamilan tidak diinginkan berdasarkan kabupaten/kota.....	25
Grafik 2.15 Capaian Kabupaten/Kota Terhadap Indikator Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Layak Minum di Kabupaten/Kota Lokasi Prioritas	27
Grafik 2.16 Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak berdasarkan kabupaten/kota	27
Grafik 2.17 Capaian Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional	28
Grafik 2.18 Capaian kabupaten/kota terhadap indikator cakupan keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan.....	29
Grafik 2.19 Capaian kabupaten/kota terhadap indikator jumlah keluarga miskin dan rentan memperoleh bantuan tunai bersyarat.....	30
Grafik 2.20 Capaian Target Sasaran yang Memiliki Pemahaman yang Baik tentang stunting di Lokasi Prioritas	30
Grafik 2.21 Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Menerima Bantuan Sosial Pangan .	31
Grafik 2.22 Capaian kabupaten/kota terhadap indikator persentase desa/kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF)	32

Grafik 3.1	Capaian dan Target pada Peningkatan Komitmen dan Visi Kepemimpinan.....	34
Grafik 3.2	Capaian dan Target Peningkatan Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP) dan Pemberdayaan Masyarakat	36
Grafik 3.3	Capaian dan Target Peningkatan Konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	40
Grafik 3.4	Capaian dan Target Kabupaten/Kota dalam Intervensi Keamanan Pangan dan Indikator lainnya.....	42
Grafik 3.5	Capaian dan Target Peningkatan Ketahanan Pangan dan Gizi pada Tingkat Individu, Keluarga, dan Masyarakat	45
Grafik 3.6	Penguatan dan pengembangan sistem data, informasi, riset, dan inovasi	48
Grafik 4.1	Capaian Pendampingan TPK pada Calon Pengantin.....	54
Grafik 4.2	Analisis Capaian Pendampingan TPK pada Calon Pengantin.....	55
Grafik 4.3	Capaian dan Analisis Pendampingan TPK pada Ibu Hamil.....	56
Grafik 4.4	Capaian dan Analisis Pendampingan TPK pada Ibu Pascasalin.....	56
Grafik 4.5	Capaian dan Analisis Pendampingan TPK pada Bayi (0-28 Hari)	57
Grafik 4.6	Capaian dan Analisis Pendampingan TPK pada Baduta (>28hari-23 Bulan)	58
Grafik 4.7	Capaian Program Bapak Asuh Anak Stunting di Provinsi Jambi	59

BAB I PENDAHULUAN

Stunting, merupakan kondisi gagal pertumbuhan pada anak akibat kekurangan gizi kronis menjadi isu serius di Indonesia saat ini dengan angka prevalensi mencapai 21.6%. Angka tersebut mengindikasikan bahwa sekitar dua dari sepuluh anak di negara ini mengalami keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan yang dapat berdampak negatif pada status kesehatan mereka secara keseluruhan. Fenomena stunting ini memicu keprihatinan mendalam dari berbagai kalangan, karena bukan hanya masalah kesehatan individu anak, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang terhadap produktivitas dan perkembangan sosial-ekonomi negara.

Salah satu faktor utama penyebab tingginya angka stunting di Indonesia adalah kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan primer dan konsumsi gizi yang memadai, terutama pada keluarga dengan ekonomi rendah. Kekurangan asupan gizi pada masa kehamilan dan 1.000 hari pertama kehidupan anak (mulai dari kehamilan hingga usia dua tahun) dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan fisik dan perkembangan otak yang sifatnya *irreversible*. Selain itu, kurangnya edukasi tentang pola makan yang seimbang, pentingnya menyusui eksklusif, serta pola asuh juga berperan penting dalam memperburuk masalah stunting ini.

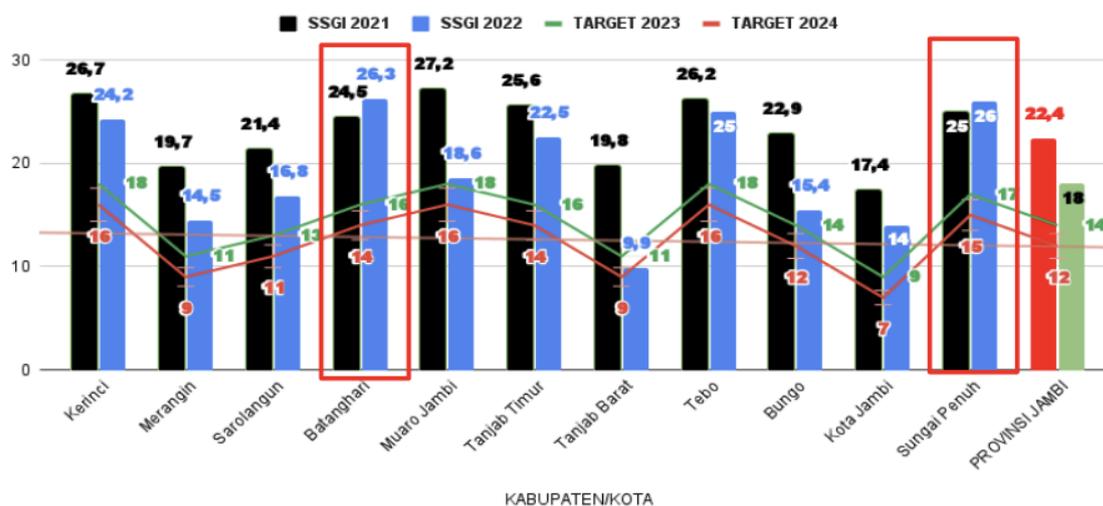
Dampak dari tingginya angka stunting sangatlah merugikan. Anak stunting pada akhirnya dapat menghambat potensi mereka untuk mencapai masa depan yang produktif. Anak-anak yang mengalami stunting cenderung memiliki hambatan pada kemampuan belajar, pada pertumbuhan fisik dan kesehatan, yang pada akhirnya dapat menghambat potensi mereka untuk mencapai masa depan yang produktif. Selain itu, stunting juga berhubungan erat dengan peningkatan risiko penyakit kronis seperti diabetes dan penyakit jantung di kemudian hari.

Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan upaya lintas sektor yang melibatkan pemerintah, masyarakat, serta sektor swasta dan lembaga non-pemerintah lainnya. Upaya tersebut meliputi perbaikan akses terhadap makanan bergizi, peningkatan pendidikan gizi bagi ibu hamil dan ibu menyusui, serta kampanye edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya gizi yang baik untuk perkembangan anak. Selain itu, investasi dalam infrastruktur kesehatan dan sanitasi juga penting guna menjamin lingkungan yang mendukung pertumbuhan anak secara optimal. Untuk mendukung semua itu, diperlukan kebijakan publik pada semua tingkatan yang memungkinkan setiap keluarga berisiko stunting memiliki akses dan fasilitas yang memadai untuk mencegah terjadinya stunting.

Pemerintah terus berupaya untuk melakukan percepatan penurunan stunting dengan target yang harus dicapai yaitu 14% di tahun 2024. Berdasarkan hasil SSGI tahun

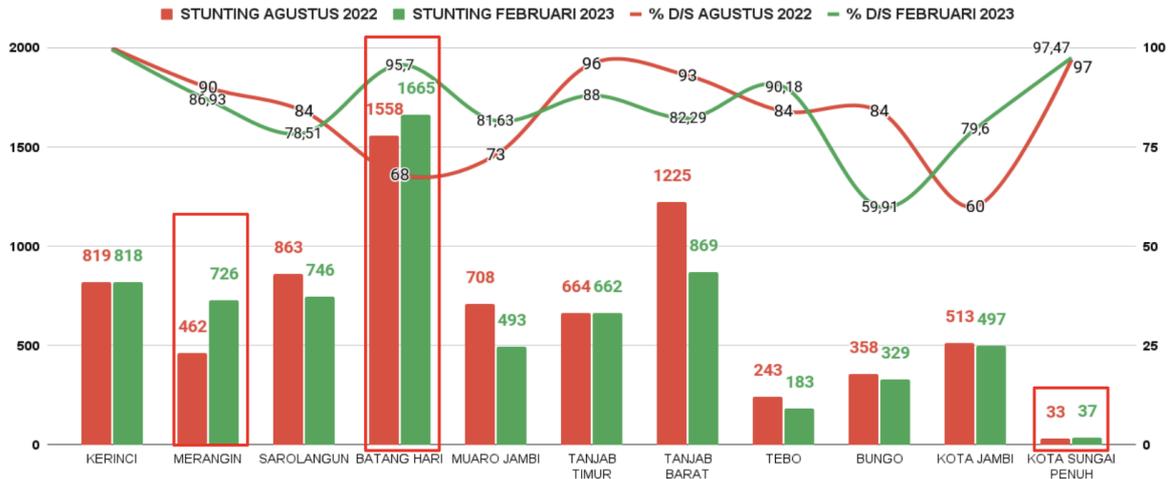
2022, angka stunting Indonesia sudah menurun menjadi 21,6% dari 24,4% pada tahun 2021. Provinsi Jambi dalam hal ini juga berhasil menurunkan angka prevalensi stunting sebesar 4,4% pada Tahun 2022, sehingga menjadi 18,0% dan menempatkan Provinsi Jambi menjadi 7 Provinsi dengan angka prevalensi terendah di Indonesia.

Kondisi prevalensi stunting di Provinsi Jambi tertinggi berada di Kabupaten Batanghari sebesar 26,2% dan terendah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 9,9%, begitupun dengan 9 kab/kota lainnya mengalami penurunan, akan tetapi terdapat 2 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Batanghari dan Kota Sungai Penuh mengalami kenaikan.



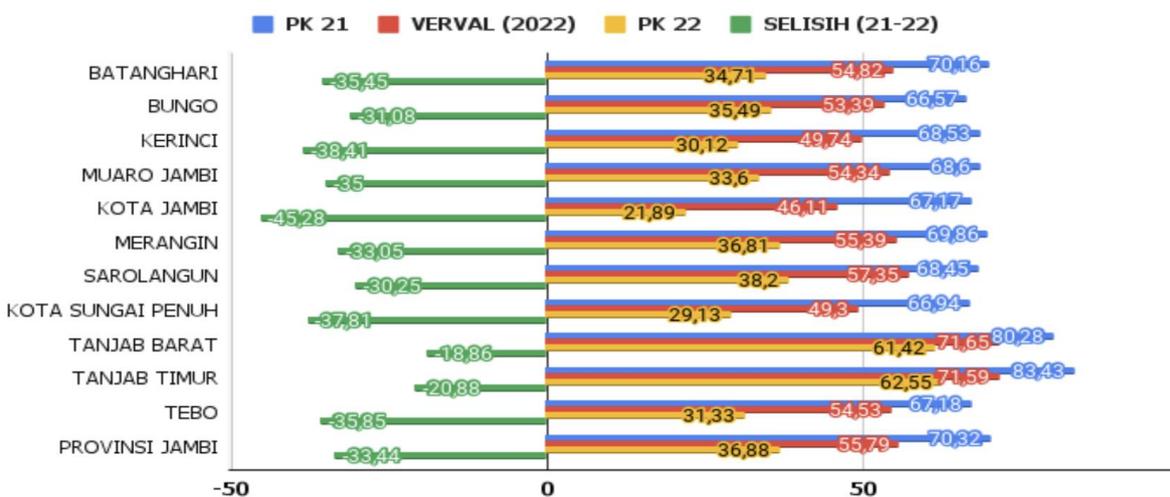
Grafik 1.1 Angka Prevalensi dan Target Penurunan Prevalensi Stunting di Provinsi Jambi

Selain angka prevalensi stunting, dalam percepatan penurunan stunting yang menjadi data dasar sasaran pelaksanaan percepatan penurunan stunting yaitu data kasus stunting dan keluarga berisiko stunting. Kondisi kasus stunting berdasarkan data elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM) Dinas Kesehatan Provinsi Jambi terdapat 7.746 kasus pada pengukuran Agustus 2022 dan terjadi penurunan pada pengukuran Februari 2023 menjadi 7.025 kasus. Dengan kasus tertinggi berada di Kabupaten Batanghari dan terendah di Kota Sungai Penuh. Disamping itu kunjungan balita ke Posyandu hampir sama sebesar 82% pada pengukuran Agustus 2022 dan Februari 2023. Terdapat 3 Kabupaten/Kota yang mengalami peningkatan kasus diantaranya Kabupaten Merangin, Kabupaten Batanghari, dan Kota Sungai Penuh. Pengukuran Februari 2023 terdapat 3 Kabupaten/Kota yang memiliki persentase kunjungan ke Posyandu dibawah 80% diantaranya Kota Jambi, Kabupaten Sarolangun, dan Kabupaten Bungo.



Grafik 1.2 Data Capaian Kunjungan Posyandu dan Kejadian Stunting di Provinsi Jambi Periode Agustus 2022 dan Februari 2023

Penurunan prevalensi dan kasus stunting di Provinsi Jambi sejalan dengan trend penurunan data keluarga berisiko stunting berdasarkan data pendataan keluarga (PK) yang dilakukan oleh BKKBN RI. Keluarga berisiko stunting terjadi penurunan sebesar 33,44% keluarga berisiko stunting pada PK 2021 dan PK 2022 menjadi 36,88%. Persentase tertinggi berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan terendah di Kota Jambi. Keluarga berisiko stunting merupakan keluarga dengan satu atau lebih faktor risiko stunting yang terdiri dari keluarga yang memiliki remaja putri, Calon Pengantin, Ibu Hamil, Anak usia 0-23 bulan, Anak usia 24-59 bulan berasal dari keluarga miskin, pendidikan orangtua rendah, sanitasi lingkungan buruk, dan air minum tidak layak.



Grafik 1.3 Trend Persentase Data Keluarga Berisiko Stunting Provinsi Jambi 2021-2022

Adanya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 telah mengarahkan semua pihak untuk melaksanakan percepatan penurunan stunting secara konvergen dan terintegrasi. Dalam rangka koordinasi percepatan penurunan stunting maka dibentuk

Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dari mulai tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.

Melalui Peraturan Presiden 72 Tahun 2021, BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana dalam upaya percepatan penurunan stunting. Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai ketua pelaksana, BKKBN menyusun Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI) yang diantaranya adalah membentuk Tim Pendampingan Keluarga (TPK) yang bertugas untuk melaksanakan pendampingan kepada keluarga berisiko stunting (kelompok sasaran) meliputi remaja, calon pengantin, ibu hamil, dan anak berusia 0-59 bulan. BKKBN juga membentuk satgas stunting yang merupakan orang-orang independen non pemerintah untuk membantu dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Pada Tahun 2023 semua tingkatan TPPS mulai dari TPPS Tingkat Provinsi, TPPS Tingkat Kabupaten/Kota, TPPS Tingkat Kecamatan, dan TPPS Tingkat Desa/Kelurahan sudah terbentuk 100% di Provinsi Jambi. Begitu pula dengan Tim Pendamping Keluarga (TPK) saat ini sudah terbentuk 100% dengan rincian 2.573 tim yang berjumlah 7.719 petugas (2.573 Bidan/Tenaga Kesehatan, 2.573 Kader PKK, 2.573 Kader KB). Selain itu satgas stunting di Provinsi Jambi telah terbentuk di Seluruh Kabupaten/Kota dan di Provinsi Jambi. Melalui ketersediaan Sumber Daya Manusia dan lembaga diharapkan percepatan penurunan stunting di Provinsi Jambi dapat mencapai target yang diharapkan.

BAB II

CAPAIAN TARGET ANTARA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI PROVINSI JAMBI

Sebagai bentuk nyata upaya Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia, Presiden RI melalui Perpres No. 72 tahun 2021 mengamanatkan bahwa upaya Percepatan Penurunan Stunting merupakan setiap upaya yang mencakup Intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerjasama multisektor dan multi pihak di pusat, daerah, dan desa.

Dalam upaya Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Perpres No. 72 Lampiran A terkait dengan Target Antara Percepatan Penurunan Stunting, terdapat 2 (dua) sasaran utama yang harus segera dipenuhi, yaitu 1) tersedianya layanan intervensi spesifik dengan 9 (sembilan) indikator, dan 2) tersedianya layanan intervensi sensitif dengan 11 (sebelas) indikator. Dari berbagai studi menunjukkan bahwa intervensi spesifik berkontribusi 30% dan intervensi sensitif 70% terhadap pencegahan stunting.

Layanan intervensi spesifik diyakini memiliki pengaruh langsung terhadap stunting. Sementara layanan intervensi sensitif memiliki pengaruh tidak langsung. Kedua layanan intervensi ini harus didukung oleh pondasi yang kokoh dalam bentuk Strategi Nasional (Stranas) yang dikenal dengan Pilar 1 sampai Pilar 5 yang berisi 1) komitmen dan visi kepemimpinan, 2) komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat, 3) konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif, 4) ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat, serta 5) penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset dan inovasi.

Layanan intervensi spesifik, intervensi sensitif dan kelima pilar tersebut harus dilakukan secara sistematis dan sinergis agar saling menguatkan satu sama lain dengan melibatkan pemerintah dan pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, media, dan akademisi (Perguruan Tinggi) atau yang lebih dikenal dengan istilah *Pentahelix*.

2.1 Layanan Intervensi Spesifik

Intervensi spesifik merupakan kegiatan yang langsung mengatasi penyebab terjadinya stunting dan umumnya diberikan oleh sektor kesehatan seperti asupan makanan, pencegahan infeksi, status gizi ibu, penyakit menular dan sebagainya.

Berdasarkan Peraturan Presiden 72 tahun 2021, layanan intervensi spesifik meliputi 1) persentase ibu hamil kurang energi kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi, 2) persentase ibu hamil yang mengonsumsi 90 Tablet Tambah Darah (TTD) selama masa kehamilan, 3) persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet

Tambah Darah (TTD), 4) persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif, 5) persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI), 6) persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk, 7) persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya, 8) persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi, dan 9) persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.

Mempertimbangkan pentingnya peran dan pengaruh langsung layanan intervensi spesifik dalam mencegah terjadinya stunting bagi anak, maka layanan intervensi dari setiap indikator yang dilaksanakan harus mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan.



Grafik 2.1 Capaian Indikator Layanan Intervensi Spesifik Provinsi Jambi

Dari 9 indikator spesifik di atas, terdapat 4 (empat) indikator yaitu 1) persentase ibu hamil yang mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan, 2) persentase remaja yang mengkonsumsi TTD, 3) persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI), 4) persentase anak berusia dibawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapatkan layanan tatalaksana dimana pada posisi semester pertama tahun 2023 telah melampaui target tahun 2023. Sisanya 5 indikator sudah mencapai di atas 50% dari masing-masing target yang telah ditetapkan.

Mencermati data capaian di atas, memberikan indikasi kuat bahwa seluruh indikator layanan spesifik dapat dicapai pada semester kedua tahun 2023 dengan catatan intervensi masing-masing indikator sebagaimana yang telah dilaksanakan pada semester pertama tidak berkurang pada semester kedua baik intensitas maupun frekuensinya.

a. Indikator Spesifik 1: Persentase Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) yang Mendapatkan Tambahan Asupan Gizi

Untuk indikator ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi pada semester pertama tahun 2023 ini telah mencapai 94,70% dari target 90%. Selisih sekitar 4,7% capaian pada semester pertama tahun 2023 memberikan indikasi optimisme untuk mencapai atau bahkan dapat melampaui target yang telah ditetapkan dengan catatan perlu percepatan penyaluran berbagai program seperti PMT dari BOK non fisik, BAAS dan sebagainya kepada Keluarga Berisiko Stunting khususnya Ibu hamil KEK. Untuk keperluan yang sama, program Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) yang selama ini sudah dibentuk di berbagai desa/kelurahan di seluruh Indonesia perlu senantiasa dioptimalkan untuk memberikan makanan sehat dan bergizi kepada Keluarga Berisiko Stunting. Upaya Kemenkes pada semester kedua tahun ini yang akan segera menyalurkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) melalui TP. PKK dan DASHAT sebagai salah satu sasarannya merupakan langkah strategis untuk mengatasi kekurangan gizi termasuk Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) guna mendapatkan tambahan asupan gizi.

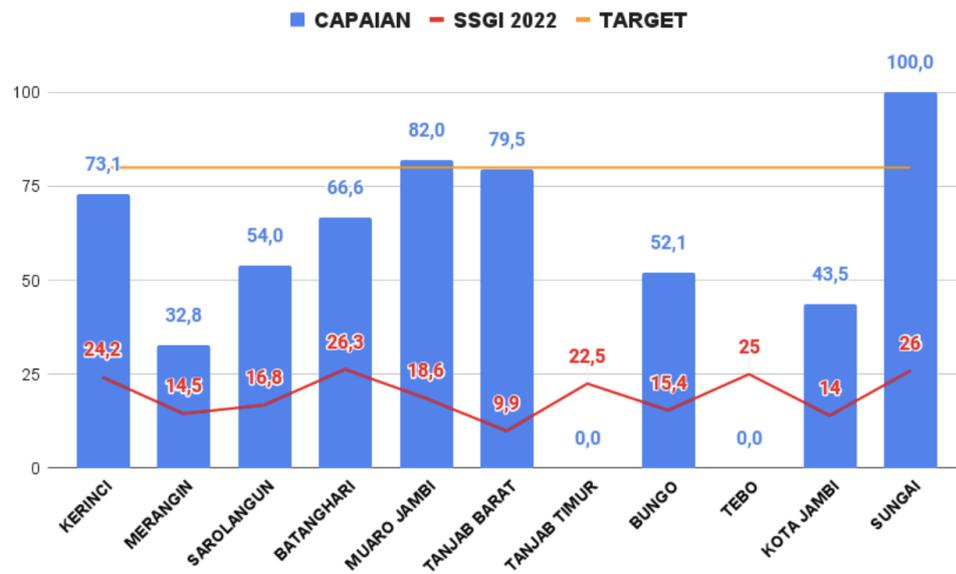


Grafik 2.2 Capaian Indikator Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang Mendapatkan Tambahan Asupan Gizi

b. Indikator Spesifik 2: Persentase Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) Minimal 90 Tablet Selama Masa Kehamilan

Indikator persentase ibu hamil mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilannya telah mencapai 53,1% dari target 80%. Indikator ini masih perlu dilakukan percepatan dalam pencapaian target, terutama di beberapa kabupaten/kota yang masih belum tercapai seperti Merangin, Sarolangun, Batanghari, Tanjung Jabung Timur, Bungo, Tebo, dan Kota Jambi. Pemberian TTD bagi ibu hamil KEK bukan sekadar pemenuhan capaian target semata, tetapi yang lebih penting dan utama lagi adalah

memastikan bahwa setiap ibu hamil terbebas dari KEK. Setidaknya Ibu Hamil mengonsumsi 90 TTD selama masa kehamilan.



Grafik 2.3 Capaian Kabupaten/Kota Terhadap Indikator Persentase Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)

c. Indikator Spesifik 3: Persentase Remaja Putri yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)

Berbeda dengan persentase ibu hamil, remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) telah mencapai 83,30% dari target 58%.

Capaian tersebut utamanya diperoleh melalui Gerakan Nasional Aksi Bergizi yang menyasar para remaja di Sekolah maupun Pesantren. Gerakan Nasional Aksi Bergizi (GNAB) di sekolah-sekolah tingkat SMP/MTS, SMA/MA, SMK, Pesantren sederajat perlu terus ditingkatkan baik cakupan maupun jangkauannya agar semakin banyak Rematri yang mengonsumsi TTD. Gerakan tersebut merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran siswa-siswi dalam membiasakan mengonsumsi makan makanan dengan menu gizi seimbang dan aktivitas fisik.



Grafik 2.4 Capaian Kabupaten/Kota terhadap Indikator Persentase Ramaja Putri yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)

d. Indikator Spesifik 4: Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan Mendapat Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif

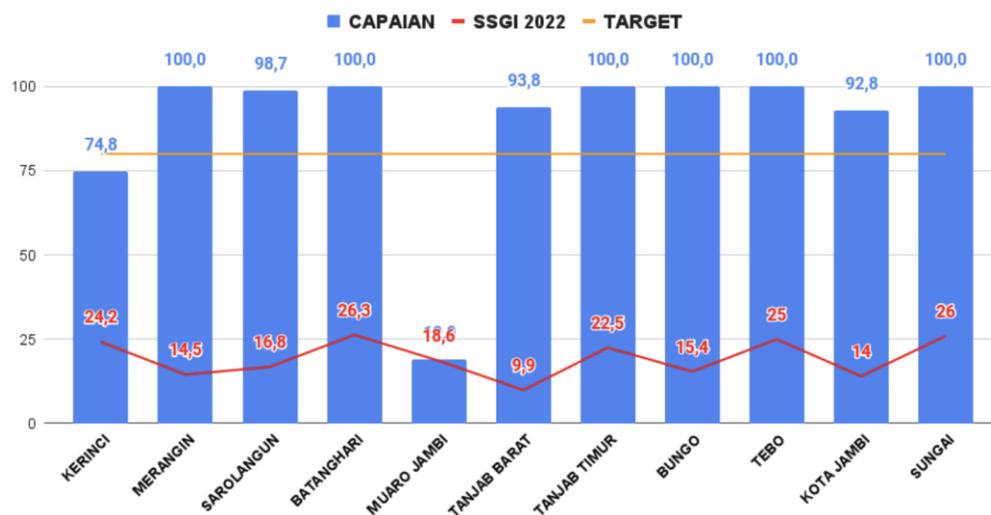
Capaian 68% untuk indikator persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif dari target 80% menunjukkan bahwa penguatan intervensi masih sangat diperlukan. Untuk itu perlu perhatian khusus terhadap indikator ini. Bukan tentang capaian target semata, tetapi yang lebih penting adalah pemahaman tentang ASI Eksklusif kepada ibu hamil, ibu menyusui dan calon PUS. Indikator persentase bayi usia sampai 6 bulan yang mendapat Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif merupakan satu satunya indikator spesifik yang tidak tercapai pada tahun 2022 yang lalu.



Grafik 2.5 Capaian Kabupaten/Kota Terhadap Indikator Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 bulan Mendapat Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif

e. Indikator Spesifik 5: Persentase Anak Usia 6-23 Bulan Yang Mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)

Pada semester pertama tahun 2023, capaian indikator persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) sebesar 89% dari target 80%. Indikator ini adalah salah satu dari empat indikator spesifik yang pada semester pertama tahun 2023 telah melampaui target. Capaian ini tentu saja sangat menggembirakan, namun layanan intervensi indikator ini tidak boleh berhenti setelah target tercapai. Upaya untuk terus meningkatkan baik intensitas maupun frekuensi dalam layanan terhadap anak usia 6-23 bulan yang mendapat MP-ASI perlu terus dilaksanakan. Hal penting selain pemberian MP-ASI adalah peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada Ibu menyusui untuk tetap memberikan ASI kepada anaknya sampai minimal usia 2 tahun. Dalam kaitan ini, TPK di setiap desa/kelurahan dapat berperan aktif untuk melakukan pendampingan ibu menyusui melalui komunikasi interpersonal dan komunikasi perubahan perilaku.



Grafik 2.6 Capaian Kabupaten/Kota Terhadap Indikator Persentase Anak Usia 6-23 Bulan yang Mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)

f. Indikator Spesifik 6: Persentase Anak Berusia di Bawah Lima Tahun (Balita) Gizi Buruk yang Mendapat Pelayanan Tata Laksana Gizi Buruk

Capaian layanan indikator Persentase anak berusia di Bawah Lima Tahun (Balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk pada semester pertama tahun 2023 sebesar 90,3% dari target 90%. Kerja keras dan upaya maksimal harus tetap dilakukan untuk memastikan setiap Balita gizi buruk mendapat layanan tata laksana gizi buruk di fasilitas kesehatan yang memadai dengan tenaga kesehatan yang kompeten. Hal ini penting dilakukan agar tidak ada lagi Balita gizi buruk yang tidak ditangani dengan baik.



Grafik 2.7 Capaian Kabupaten/Kota Terhadap Indikator Persentase Anak Berusia dibawah Lima Tahun (Balita) Gizi Buruk Mendapat Pelayanan Tata Laksana Gizi Buruk

g. Indikator Spesifik 7: Indikator Persentase Anak Berusia di Bawah Lima Tahun (Balita) yang dipantau Pertumbuhan dan Perkembangannya

Capaian pemantauan pertumbuhan dan perkembangan Balita sebesar 83,30% dari target 90% menunjukkan bahwa ada kebutuhan bagi Keluarga yang memiliki Balita untuk mengoptimalkan pemantauan Balita di Posyandu, Puskesmas, Pustu dan fasilitas kesehatan lainnya. Selisih antara capaian dan target sebesar 6,7% perlu diselesaikan pada paruh waktu semester kedua tahun 2023. Hal ini penting dilakukan agar pertumbuhan dan perkembangan Balita dapat dideteksi lebih dini untuk menjaga agar Balita tetap sehat dan mencegah terjadinya gizi kurang dan gizi buruk. Melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan Balita acap kali abai dilakukan karena berbagai sebab, diantaranya karena kesibukan orang tua, kurang pemahaman orang tua tentang pentingnya pertumbuhan dan perkembangan Balita. Untuk itu, TPK perlu meningkatkan intensitas pendampingan bagi ibu Balita untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan Balitanya. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan Balita harus dilakukan secara komprehensif dan berkualitas melalui kegiatan stimulasi yang memadai, deteksi dini dan intervensi dini terhadap gangguan tumbuh kembang Anak.



Grafik 2. 8 Capaian kabupaten/kota terhadap indikator persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) dipantau pertumbuhan dan perkembangannya

h. Indikator Spesifik 8: Persentase Anak Balita dengan Gizi Kurang yang Mendapat Tambahan Asupan Gizi

Persentase anak Balita dengan gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi, capaiannya sebesar 58,3% dari target 90%. Ini menunjukkan bahwa seorang Ibu perlu menyiapkan diri sejak hamil dan menyusui. Pemenuhan gizi yang optimal saat hamil dan menyusui akan memberikan asupan gizi yang baik untuk Balita. Setelah melahirkan, seorang Ibu perlu melanjutkan pemberian gizi yang baik dengan pemberian ASI eksklusif hingga usia 6 bulan, dilanjutkan dengan pemberian MP-ASI dalam jumlah cukup dan pada waktu yang tepat, dengan tetap disertai pemberian ASI hingga usia 2 tahun. Untuk mencegah Balita gizi kurang, perlu kampanye yang lebih masif, edukasi dan pendampingan yang lebih intens bagi Keluarga Berisiko Stunting khususnya ibu hamil, ibu menyusui dan ibu yang memiliki Balita agar lebih memahami tentang pencegahan balita gizi kurang sejak dini. TPK dapat berperan aktif untuk memastikan ibu yang memiliki Balita memahami tentang manfaat ASI Eksklusif, pemberian ASI sampai usia 2 (dua) tahun, MPASI dan makanan bergizi.



Grafik 2. 9 Capaian kabupaten/kota terhadap indikator persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi

i. Indikator Spesifik 9: Persentase Anak Berusia di Bawah Lima Tahun (Balita) yang Memperoleh Imunisasi Dasar Lengkap

Capaian untuk indikator persentase anak Balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap pada Balita sebesar 83,3% dari target 90%. Capaian ini mengindikasikan masih ada gap sebesar 6,7% antara capaian dan target. Selisih sebesar itu harus dapat dipenuhi pada semester kedua tahun 2023. Dari beberapa hasil penelitian, secara umum penyebab keengganan keluarga Balita melakukan imunisasi dasar lengkap karena beberapa sebab, diantaranya karena 5 (lima) faktor, yaitu 1) takut dan trauma balitanya demam setelah diimunisasi, 2) jarak rumah ke Posyandu yang jauh, 3) sibuk dengan pekerjaan, 4) kurang mendapat dukungan keluarga, dan 5) tidak mengetahui informasi jadwal imunisasi. Untuk mengatasi hal tersebut, Technical Assistance kabupaten/kota dapat mengambil meluruskan informasi yang tidak benar tentang imunisasi tersebut melalui WA Grup TA dan TPK. Di sisi lain, TPK dapat melakukan pendampingan melalui komunikasi interpersonal dan komunikasi perubahan perilaku dan pendampingan layanan rujukan KRS khususnya Ibu yang memiliki Balita ke Puskesmas, Pustu, Posyandu atau fasilitas kesehatan terdekat. Kecuali itu, semua pihak perlu memobilisasi semua sumber daya yang ada untuk mensosialisasikan manfaat imunisasi dan memastikan vaksin mudah didapat dan mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat serta dapat meningkatkan pelayanan imunisasi yang bermutu dan merata.

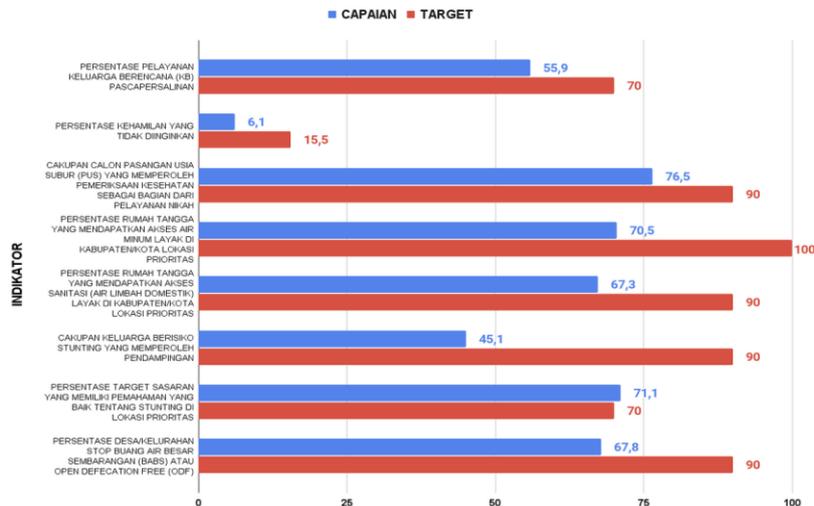


Grafik 2.10 Capaian kabupaten/kota terhadap indikator persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap

2.2 Layanan Intervensi Sensitif

Intervensi sensitif merupakan layanan intervensi yang tidak langsung mengatasi penyebab terjadinya stunting yang memiliki kontribusi sebesar 70% terhadap stunting. Intervensi layanan sensitif dilaksanakan oleh berbagai sektor terkait baik pusat maupun daerah. Rumpun layanan intervensi sensitif diantaranya adalah sanitasi layak, air minum layak, pola asuh, keluarga berencana, pemahaman sasaran tentang stunting, pola hidup bersih dan sehat, kemiskinan, dan sebagainya.

Berdasarkan Peraturan Presiden 72 tahun 2021, indikator yang termasuk ke dalam intervensi sensitif adalah 1) persentase pelayanan KB pasca persalinan, 2) persentase kehamilan tidak diinginkan, 3) cakupan calon PUS memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah, 4) persentase rumah tangga mendapatkan akses air minum layak di kabupaten/kota lokasi prioritas, 5) persentase rumah tangga mendapatkan akses sanitasi sanitasi (air limbah domestik) layak di kabupaten/kota lokasi prioritas, 6) cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional, 7) cakupan keluarga berisiko stunting memperoleh pendampingan, 8) jumlah keluarga berisiko stunting dan rentan memperoleh bantuan tunai bersyarat, 9) persentase target sasaran memiliki pemahaman yang baik tentang stunting di lokasi prioritas, 10) jumlah keluarga miskin dan rentan menerima bantuan sosial pangan, dan 11) persentase desa/ kelurahan stop buang air besar sembarangan (BABS) atau open defecation free (ODF).



CAKUPAN BANTUAN JAMINAN NASIONAL PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) KESEHATAN (JUTA)
575.600 JIWA

JUMLAH KELUARGA MISKIN DAN RENTAN YANG MEMPEROLEH BANTUAN TUNAI BERSYARAT
105.294 KELUARGA

JUMLAH KELUARGA MISKIN DAN RENTAN YANG MENERIMA BANTUAN SOSIAL PANGAN
155.419 KELUARGA

Grafik 2.11 Capaian kabupaten/kota terhadap indikator persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap

Mencermati tingginya pengaruh tidak langsung layanan intervensi sensitif terhadap penyebab terjadinya stunting, maka sudah selayaknya kesebelas indikator layanan intervensi sensitif tersebut perlu upaya yang optimal untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Pada posisi semester pertama tahun 2023, dari 11 indikator layanan sensitif, terdapat 2 (dua) indikator yang tidak tersedia data capaiannya yaitu indikator 1) Persentase kehamilan yang tidak diinginkan, Indikator 2) Persentase Target Sasaran yang memiliki pemahaman baik tentang stunting di lokasi prioritas. Angka capaian yang tertera pada tabel layanan intervensi sensitif untuk keempat indikator tersebut adalah capaian tahun 2022. Secara umum, ketersediaan keempat data tersebut diukur periode tahunan bukan semesteran. Dengan demikian, pada laporan tahun 2023 nanti, semua data layanan intervensi sensitif dapat disajikan data capaiannya. Disisi lain 6 indikator lainnya masih belum mencapai target sasaran dan 3 indikator lainnya belum ditentukan target capaian di tingkat Kabupaten/Kota.

- a. **Indikator Sensitif 1: Persentase Pelayanan KB Pasca Persalinan (KBPP)**
Capaian persentase pelayanan KB Pasca Persalinan (KBPP) pada posisi semester pertama tahun 2023 mencapai 55,9% dari target 70% tahun 2023. Capaian ini mengkonfirmasi optimisme untuk mendapatkan 4,1% yang harus dicapai pada semester kedua tahun 2023. Meskipun selisih antara capaian dan target tidak banyak, pelayanan KB pasca persalinan harus dilaksanakan sebagaimana yang berlangsung selama ini. Untuk memastikan setiap ibu melahirkan di fasilitas kesehatan menggunakan kontrasepsi, maka perlu dilakukan edukasi dan komunikasi interpersonal kepada pasien sebelum pulang.



Grafik 2.12 Capaian Palayanan KB Pasca Persalinan (KBPP)

Untuk itu, dokter, bidan dan perawat perlu mengedukasi ibu melahirkan untuk menggunakan salah satu kontrasepsi sebelum meninggalkan rumah sakit, puskesmas atau fasilitas kesehatan, tempat dimana seorang ibu melahirkan. Dengan menggunakan kontrasepsi, diharapkan keluarga memiliki waktu dan perhatian yang memadai dalam mengasuh dan mendidik anak yang baru dilahirkannya. Pasien perlu diberi pemahaman tentang 4T, yaitu yaitu Terlalu muda melahirkan, Terlalu tua melahirkan, Terlalu dekat jarak melahirkan dan Terlalu sering melahirkan. Perlu dipastikan bahwa Pasien yang melahirkan dapat memahami dengan benar risiko dari 4T tersebut.

- b. Indikator Sensitif 2: Persentase Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD)**
 Capaian persentase Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD) sebesar 6,1% (Capaian tahun 2022) dari target 15,5% menunjukkan bahwa target KTD telah dicapai pada semester pertama tahun 2023. Kehamilan yang tidak diinginkan atau yang biasa dikenal sebagai KTD merupakan kehamilan yang terjadi dimana salah satu atau kedua belah pihak dari pasangan tidak menginginkan terjadinya kehamilan, paling tidak 2 (dua) tahun ke depan. Kasus KTD yang kini banyak terjadi umumnya pada remaja karena berbagai sebab. Namun demikian, KTD juga bisa terjadi pada Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan salah satu kontrasepsi, terutama kontrasepsi seperti kondom dan pil. Sudah menjadi rahasia umum penggunaan kondom atau pil ternyata masih terjadi kehamilan karena kealpaan dalam penggunaannya seperti lupa minum pil tiap malam, ketidaksempurnaan menggunakan kondom dan sebagainya. Dengan demikian, KTD bukan semata-mata terjadi pada pasangan remaja yang belum terikat perkawinan tetapi bisa juga berlaku bagi PUS yang ingin menunda kehamilan terjadi terjadi kehamilan karena berbagai sebab di atas.



Grafik 2.13 Capaian kabupaten/kota Terhadap Indikator Persentase Kehamilan tidak diinginkan berdasarkan kabupaten/kota

c. Indikator Sensitif 3: Persentase Calon PUS yang Memperoleh Pemeriksaan Kesehatan Sebagai Bagian dari Pelayanan Nikah

Indikator Calon PUS pada semester pertama tahun 2023 yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah berdasarkan data KUA dan Simkah memiliki mencapai 76,5% dari target 90%.



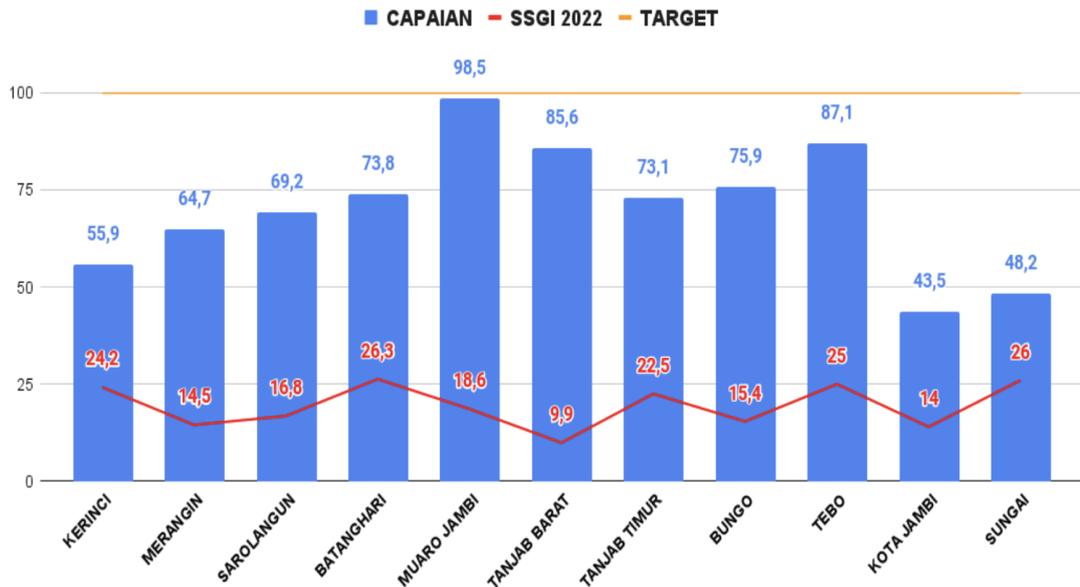
Grafik 2.14 Capaian kabupaten/kota Terhadap Indikator Persentase Kehamilan tidak diinginkan berdasarkan kabupaten/kota

Rendahnya capaian indikator ini terhadap target indikator calon PUS yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya 1) belum kuatnya regulasi pemerintah daerah terkait pemeriksaan kesehatan calon PUS melalui Aplikasi Elsimil 2) belum optimalnya informasi pendampingan 3 bulan pra nikah bagi calon pengantin oleh Tim Pendamping Keluarga, 3) Banyak Catin yang sudah

melakukan pemeriksaan kesehatan tetapi tidak melakukan registrasi pada aplikasi Elsimil, 4) Registrasi Elsimil belum menjadi kebiasaan bagi Catin, 5) Jaringan komunikasi yang lemah di beberapa daerah remote area, 6) Beberapa kabupaten-kota menggunakan aplikasi daerah sebagai pengganti Elsimil, dan sebagainya. Pemeriksaan kesehatan bagi calon PUS memang bukan prasyarat pernikahan, tetapi proses ini menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap pasangan khususnya perempuan yang akan melangsungkan pernikahan dalam kondisi sehat guna menyiapkan diri menghadapi kehamilan dan kelahiran untuk meminimalisir potensi melahirkan anak stunting. Di samping itu, melalui program tersebut juga diharapkan untuk mengurangi dan menghindari Angka Kematian Ibu (AKI) karena melahirkan. Untuk itu, upaya untuk meningkatkan capaian indikator tersebut harus ditingkatkan pada paruh waktu semester kedua tahun 2023, diantaranya melalui pendampingan TPK kepada Catin, edukasi TPK oleh TA melalui WA Grup yang sudah tersedia, memastikan seluruh KUA dan tempat ibadah agama selain Islam menggunakan Elsimil pada saat pendaftaran nikah, dan cara lain yang sesuai dengan kondisi di daerah masing-masing, melakukan interoperabilitas data Elsimil dengan data aplikasi catin yang dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten-kota.

d. Indikator Sensitif 4: Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Layak Minum di Kabupaten/Kota Lokasi Prioritas

Posisi pada semester pertama tahun 2023, capaian persentase rumah tangga mendapatkan akses air layak minum di kabupaten/kota lokasi prioritas sebesar 70,5% dari target 100%. Untuk meningkatkan aksesibilitas rumah tangga memperoleh akses air layak minum perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperluas infrastruktur air minum bagi rumah tangga yang tidak memiliki akses air minum layak. Disamping itu perlu edukasi kepada keluarga untuk memahami air layak minum adalah bebas dari sumber pencemaran, seperti binatang yang membawa penyakit, logam atau bahan kimia lainnya.



Grafik 2.15 Capaian Kabupaten/Kota Terhadap Indikator Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Layak Minum di Kabupaten/Kota Lokasi Prioritas

e. Indikator Sensitif 5: Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak di Kabupaten/Kota Prioritas

Indikator persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di kabupaten/kota lokasi prioritas mencapai 67,3% dari target 90%.

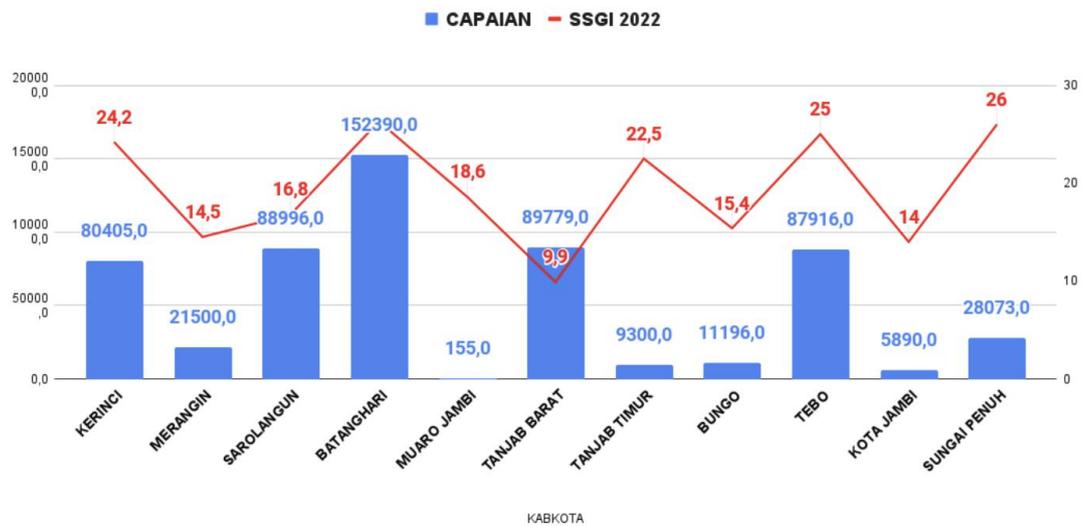
Capaian tersebut tentu saja sangat menggembirakan karena ketersediaan akses sanitasi layak khususnya di kabupaten/ kota prioritas sangat penting dan besar pengaruhnya dalam mencegah terjadinya stunting.



Grafik 2.16 Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak berdasarkan kabupaten/kota

f. Indikator Sensitif 6: Cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional

Cakupan Jaminan Nasional Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kesehatan mencapai 575.600 penduduk. Indikator ini masih belum ditetapkan target capaian baik di Provinsi/Kabupaten/Kota. Pencapaian target ini penting untuk memastikan semua orang miskin dapat memperoleh pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang telah ditentukan. Data capaian indikator ini hanya berskala nasional tidak tersedia pada level kabupaten/kota.



Grafik 2. 17 Capaian Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional

g. Indikator Sensitif 7: Cakupan Keluarga Berisiko stunting yang Memperoleh Pendampingan

Data capaian untuk indikator cakupan keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan pada semester pertama tahun 2023 adalah 45,1% dari target 90% di tahun 2023. Angka tersebut merepresentasikan belum optimalnya keberhasilan dalam pendampingan keluarga-keluarga yang memiliki risiko tinggi stunting, yang tentunya merupakan isu kritis yang perlu diatasi dengan serius.

Dalam konteks ini, pendampingan yang diberikan bertujuan untuk memastikan bahwa keluarga yang berisiko stunting tidak hanya diidentifikasi, namun juga mendapatkan layanan dan dukungan yang memadai untuk mencegah terjadinya stunting pada anggota keluarganya. Layanan ini dapat berupa konsultasi gizi, pemberian makanan tambahan, atau dukungan lainnya yang relevan dengan kebutuhan spesifik dari setiap keluarga. Selain itu, dalam kasus-kasus tertentu di mana diperlukan, keluarga-keluarga tersebut juga akan dirujuk ke lembaga atau instansi lain yang dapat memberikan dukungan lebih lanjut atau layanan khusus untuk mengatasi risiko stunting. Indikator ini juga merupakan salah satu faktor yang penting dalam upaya mengurangi prevalensi stunting dan mendukung kesejahteraan keluarga-keluarga yang berisiko.



Grafik 2. 18 Capaian kabupaten/kota terhadap indikator cakupan keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan

Terdapat 5 Kabupaten/Kota yang perlu pengecekan kembali laporan yang disampaikan karena masih dibawah 10%, 5 Kabupaten/Kota tersebut yaitu Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Tebo.

h. Indikator Sensitif 8: Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Bantuan Tunai Bersyarat.

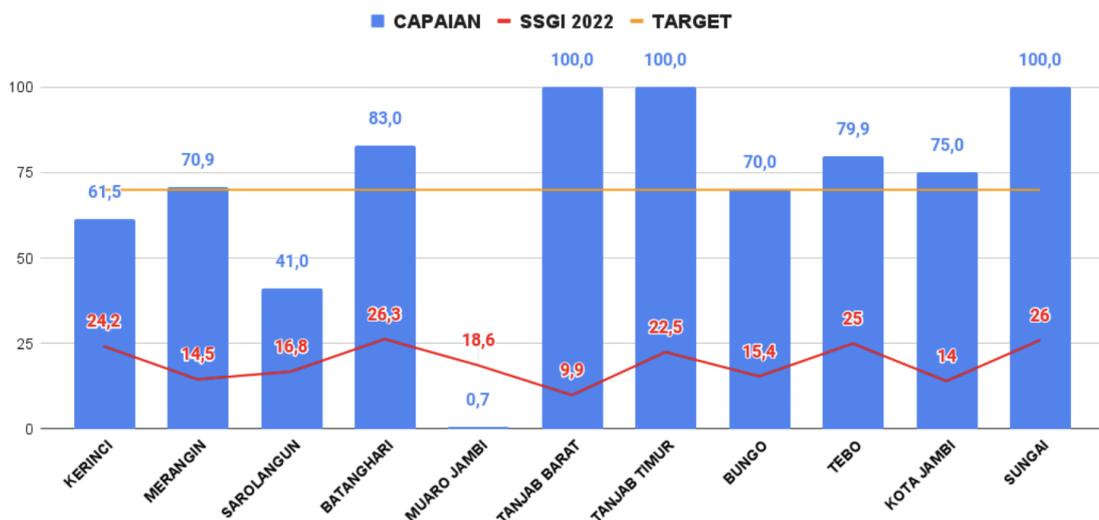
Capaian jumlah keluarga miskin dan rentan memperoleh bantuan tunai bersyarat mencapai 105.294 keluarga. Indikator ini belum ditetapkan untuk target dari Provinsi dan Kabupaten/Kota. Bantuan tunai bersyarat sebagai program pemberian bantuan finansial kepada keluarga miskin dan rentan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan mereka, dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh penerima bantuan. Bantuan ini diharapkan dapat digunakan oleh Penerima untuk memenuhi kebutuhan makanan yang diperlukan dalam mengatasi kekurangan gizi keluarganya.



Grafik 2. 19 Capaian kabupaten/kota terhadap indikator jumlah keluarga miskin dan rentan memperoleh bantuan tunai bersyarat

i. Indikator Sensitif 9: Persentase Target Sasaran yang Memiliki Pemahaman yang Baik tentang stunting di Lokasi Prioritas

Data capaian untuk indikator persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang stunting di lokasi prioritas pada semester pertama tahun 2023 ini belum tersedia. Angka yang tertera pada grafik di atas adalah data capaian tahun 2022. Data capaian indikator ini baru akan tersedia setelah Survei Kesehatan Indonesia selesai dilaksanakan.



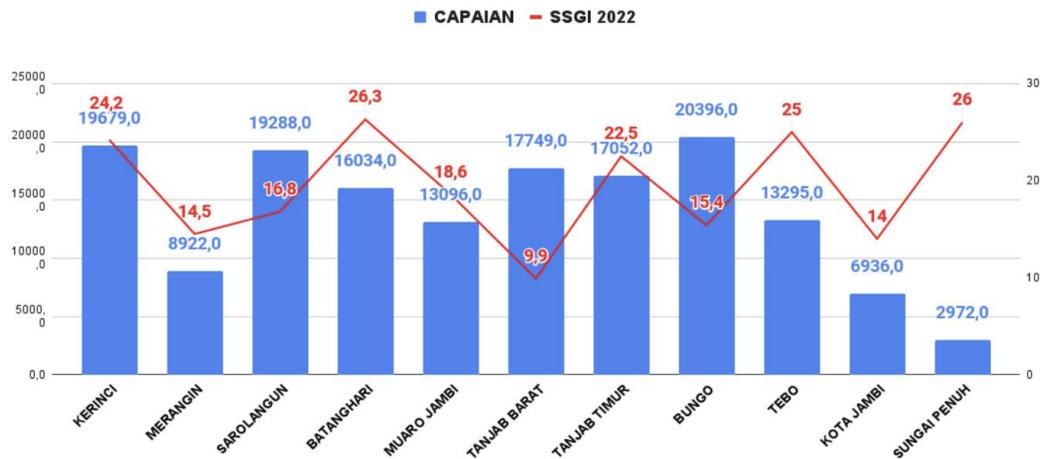
Grafik 2.20 Capaian Target Sasaran yang Memiliki Pemahaman yang Baik tentang stunting di Lokasi Prioritas

j. Indikator Sensitif 10: Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Menerima Bantuan Sosial Pangan

Capaian jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan pada semester pertama tahun 2023 telah mencapai 155.419 keluarga.

Diharapkan keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan dapat memanfaatkan bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan asupan gizi bagi keluarganya. Data capaian indikator ini hanya berskala nasional tidak tersedia pada level Provinsi/kabupaten/kota.

Data capaian indikator ini hanya berskala nasional tidak tersedia pada level provinsi/kabupaten/kota



Grafik 2. 21 Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Menerima Bantuan Sosial Pangan

k. Indikator Sensitif 11: Persentase Desa/Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF)

Indikator Desa/Kelurahan Stop BABS atau Open Defecation Free (ODF) memiliki capaian 67,8% pada semester pertama tahun 2023 dari target 90%. Capaian ini mengonfirmasi bahwa indikator penting yang mempengaruhi kesehatan publik dan dapat menjadi faktor berpengaruh tinggi terhadap terjadinya stunting perlu diupayakan untuk mencapai target pada semester kedua tahun 2023. Program sanitasi komunitas dan kampanye kesadaran masyarakat akan kebersihan dan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) perlu ditingkatkan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan untuk merubah perilaku masyarakat dalam kebiasaan BABS. Edukasi dan komunikasi perubahan perilaku masyarakat harus dilakukan oleh secara terus-menerus oleh berbagai pihak, karena merubah kebiasaan masyarakat memerlukan upaya yang optimal dan berkelanjutan.



Grafik 2. 22 Capaian kabupaten/kota terhadap indikator persentase desa/kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF)

Secara keseluruhan, capaian layanan intervensi sensitif pada semester pertama tahun 2023 ini mengindikasikan bahwa meskipun ada beberapa kemajuan, masih perlu penguatan pada semester kedua tahun 2023 terutama pada beberapa indikator yang belum optimal. Kolaborasi OPD/Instansi dan peningkatan anggaran di beberapa sektor bisa menjadi kunci untuk mempercepat pencapaian target ini. Kecuali itu, ketersediaan data capaian setiap indikator tepat waktu menjadi bagian yang harus menjadi perhatian bersama.

BAB III

CAPAIAN PILAR STRATEGI NASIONAL

PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING PROVINSI JAMBI

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 menunjukkan komitmen serius pemerintah Indonesia dalam upaya Percepatan Penurunan Stunting. Melalui peraturan ini, pemerintah mengamanatkan 5 (lima) pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting.

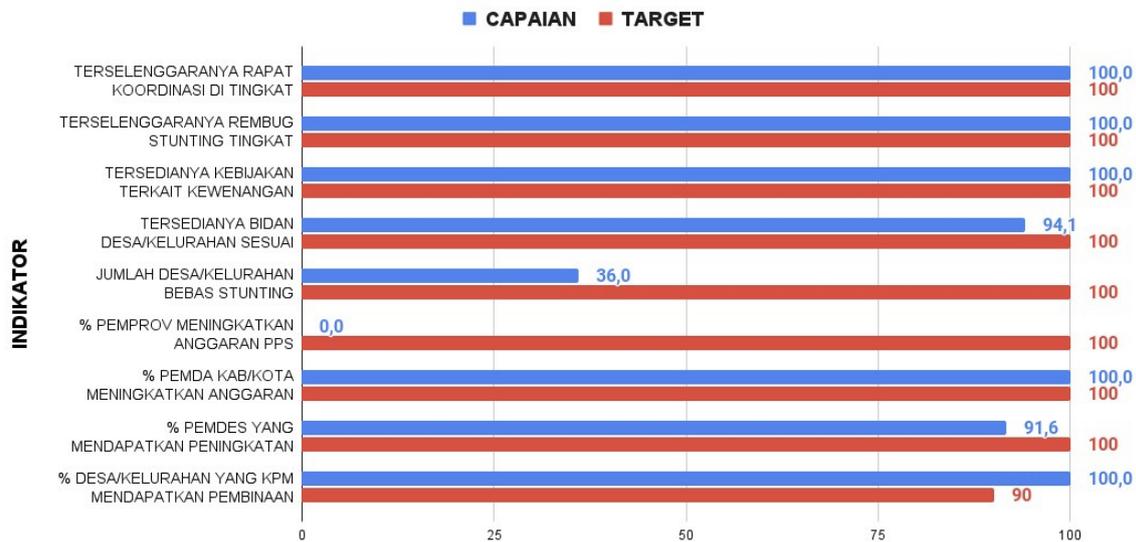
- **Peningkatan Komitmen dan Visi Kepemimpinan:** Pilar ini menekankan pentingnya peran kepemimpinan di semua level pemerintahan, mulai dari kementerian dan lembaga hingga pemerintah daerah dan desa. Kepemimpinan dengan komitmen tinggi dan memiliki visi yang jelas akan mempermudah dalam melakukan koordinasi dan pelaksanaan program percepatan penurunan stunting.
- **Peningkatan Komunikasi Perubahan Perilaku dan Pemberdayaan Masyarakat:** Pilar ini fokus pada advokasi kepada pembuat kebijakan publik dan edukasi kepada masyarakat. Tujuannya agar pejabat publik dapat membuat kebijakan publik yang mendukung terhadap program percepatan stunting yang menjadi kewenangannya. Selaras dengan itu, edukasi diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar berkontribusi pada stunting, seperti kebiasaan pola hidup sehat dan bersih, konsumsi air minum dan menjaga sanitasi yang layak, kebiasaan memberi ASI eksklusif, makanan bergizi dan pola asuh, serta memberdayakan masyarakat agar dapat mengakses sumber daya yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.
- **Peningkatan Konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif:** Pilar ini berfokus pada integrasi berbagai jenis intervensi, baik yang bersifat spesifik (seperti program gizi dan kesehatan) maupun sensitif (seperti akses ke pendidikan, pelayanan KB dan sanitasi). Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa intervensi dilakukan secara koordinatif dan saling mendukung baik antar kementerian dan lembaga, juga antara pemerintah dengan pemerintah daerah dan pemerintah desa.
- **Peningkatan Ketahanan Pangan dan Gizi:** Pilar ini menekankan pentingnya akses kepada pangan yang berkualitas dan bergizi bagi semua individu, keluarga, dan komunitas. Ini bisa mencakup berbagai upaya, dari peningkatan produksi pangan lokal hingga edukasi gizi, termasuk kesiapan cadangan pangan pemerintah manakala terjadi bencana alam dan sebagainya.
- **Penguatan dan Pengembangan Sistem, Data, Informasi, Riset, dan Inovasi:** Pilar ini fokus pada pembangunan infrastruktur informasi dan penelitian yang kuat. Data yang akurat dan tepat waktu sangat penting untuk memonitor efektivitas program dan melakukan penyesuaian strategi jika diperlukan.

Dengan kelima pilar ini, pemerintah Indonesia berusaha untuk menciptakan sebuah pendekatan yang komprehensif dan terpadu dalam menangani isu stunting. Diharapkan, melalui penerapan strategi ini, akan terjadi penurunan signifikan pada

angka stunting yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

3.1 Pilar 1. Peningkatan Komitmen dan Visi Kepemimpinan

Komitmen dan visi kepemimpinan merupakan satu hal yang utama dalam upaya Percepatan Penurunan Stunting pada semua level pemerintahan.



Grafik 3. 1 Capaian dan Target pada Peningkatan Komitmen dan Visi Kepemimpinan

a. Meningkatkan Komitmen Percepatan Penurunan Stunting

Capaian indikator terselenggaranya rapat koordinasi di tingkat kabupaten/kota pada semester pertama tahun 2023 mencapai 100% dari target 100% pada tahun 2023. Ini artinya bahwa 11 kabupaten/ kota, pada semester pertama telah melaksanakan rapat koordinasi pada semester pertama tahun 2023. Rapat koordinasi ini penting terutama untuk menyepakati dan melaksanakan berbagai hal terkait dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi percepatan penurunan stunting, termasuk forum untuk menilai kinerja capaian PPS yang telah dilaksanakan selama ini.

Indikator terselenggaranya rembug stunting tingkat kecamatan pada semester pertama tahun 2023, dari 144 kecamatan seluruh Indonesia telah melaksanakan rembug stunting tingkat kecamatan. Kegiatan rembug stunting kecamatan biasanya berjalan di salah satu kegiatan mini lokakarya kecamatan yang tersedia dari dana DAK BOKB. Kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk melihat dan berdiskusi bersama terkait dengan masalah, kendala dan aksi yang perlu dilakukan kemudian dapat disepakati dan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Capaian adanya kebijakan/peraturan Bupati/Walikota tentang kewenangan Desa/Kelurahan dalam penurunan stunting sudah mencapai 100% atau 11 kabupaten/kota telah mengeluarkan kebijakan/peraturan pada semester pertama tahun 2023 dari target 100% pada tahun 2024. Kegiatan ini didorong melalui aksi konvergensi yang dilaksanakan oleh Bangda Kemendagri RI, hal ini juga menjadi kegiatan di aksi ke 4 terkait dengan kebijakan untuk wewenang Desa/Kelurahan dalam Percepatan Penurunan Stunting.

Target capaian Bidan Desa/Kelurahan sesuai kebutuhan 100% pada tahun 2023, pada semester pertama tahun 2023 telah dicapai sebesar 94,1% atau 1.472 desa/kelurahan dari 1.564 desa/kelurahan. Mengingat penyediaan Bidan Desa/Kelurahan sesuai kebutuhan terkait dengan mekanisme pengadaan tenaga, tersedianya anggaran, dan sebagainya, maka bagi 92 Desa/Kelurahan atau 5,9% Desa/Kelurahan yang pada semester pertama tahun 2023 belum dapat memenuhi capaian Bidan Desa/Kelurahan sesuai kebutuhan, maka perlu melakukan advokasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti IBI Cabang, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Puskesmas, dan sebagainya. Diharapkan pada semester kedua tahun 2023 ini, ketersediaan Bidan/Kelurahan sesuai kebutuhan.

Pencapaian target Jumlah Desa/Kelurahan Bebas Stunting yang pada semester pertama tahun 2023 mencapai 36,0% atau 564 desa/ kelurahan dari target 100% atau 1.564 desa/kelurahan pada tahun 2024. Meskipun capaian pada semester pertama tahun 2023, target jumlah Desa/Kelurahan Bebas Stunting baru mencapai 36%, namun jika capaian pada waktu yang tersisa sampai semester kedua tahun 2024, dengan seluruh Desa/Kelurahan berpartisipasi aktif dalam intervensi kasus stunting di wilayah masing-masing.

Capaian target persentase Pemerintah Daerah Provinsi yang meningkatkan APBD untuk Percepatan Penurunan Stunting sampai dengan tahun 2023 0% artinya tidak ada peningkatan APBD di Provinsi Jambi dari tahun 2022 atau berarti APBD mengalami penurunan. Hal ini dipengaruhi oleh adanya rasionalisasi APBD di Provinsi Jambi yang mengalami defisit anggaran. Harapannya dalam proses rasionalisasi APBD kegiatan percepatan penurunan stunting tetap dapat dipertahankan untuk dijalankan.

Capaian target persentase Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang meningkatkan APBD untuk Percepatan Penurunan Stunting sampai dengan semester pertama tahun 2023 baru mencapai 100% atau 11 kabupaten/kota. Capaian ini cukup berbeda dengan peningkatan anggaran di APBD Provinsi. Mengingat perencanaan APBD disusun dan disahkan di akhir tahun untuk tahun berikutnya, maka besar kemungkinan jumlah persentase Pemda kabupaten/kota yang meningkatkan APBD untuk PPS tidak akan banyak

berubah, kecuali bagi kabupaten/kota yang melakukan revisi atau perubahan anggaran pada tahun berjalan.

Persentase desa/kelurahan yang Kader Pembangunan manusianya mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah kabupaten/ kota mencapai 100% atau 1.564 desa/ kelurahan dari target 90% tahun 2024. Harapan upaya pembinaan dari pemerintah kabupaten/kota kepada Kader Pembangunan Manusia desa/ kelurahan terus diupayakan secara konsisten dan berkelanjutan.

b. Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Desa

Pencapaian persentase Desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan Percepatan Penurunan Stunting mencapai 91,6% atau 55.179 desa dari target 100% tahun 2023. Diharapkan pada semester kedua tahun 2023, seluruh desa (1.564) mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan Percepatan Penurunan Stunting.

c. Jumlah Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlatih modul kesehatan dan gizi

Jumlah pendamping PKH mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota mencapai 100% atau 562 pendamping dari target 90% tahun 2023. Melalui pendamping PKH harapannya seluruh penerima manfaat dapat terpapar modul kesehatan dan gizi untuk diterapkan dalam keluarga masing-masing.

3.2 Pilar 2. Peningkatan Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP) dan Pemberdayaan Masyarakat



Grafik 3. 2 Capaian dan Target Peningkatan Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP) dan Pemberdayaan Masyarakat

- a. Terlaksananya Kampanye Nasional Pencegahan Stunting
Kampanye nasional pencegahan stunting mencapai 100% dari target 100% pada semester kedua tahun 2023. Indikator ini harapannya dioptimalkan pada semester kedua tahun 2023 melalui berbagai platform media yang tersedia baik itu media sosial, media lokal/tradisional yang ada di tengah-tengah masyarakat maupun melalui komunikasi kelompok maupun melalui komunikasi interpersonal oleh Petugas yang kompeten maupun oleh Tim Pendamping Keluarga. Tingginya capaian kampanye nasional pencegahan stunting adalah hal baik, tetapi belum mengindikasikan tingginya pemahaman sasaran tentang stunting. Tingkat pemahaman Keluarga Berisiko Stunting sebagai end users perlu dilakukan melalui survei tersendiri.
- b. Persentase Keluarga Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)
Persentase keluarga stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) telah mencapai 81,4% pada semester pertama tahun 2023 dari target 90% pada tahun 2023. Capaian ini memberikan optimisme untuk mencapai target, karena selisih sebesar 8,6% dapat dicapai dalam 1 semester ke depan dengan catatan komunikasi perubahan perilaku oleh TPK atau pihak terkait terus dilaksanakan dan pendekatan kepada masyarakat perlu ditingkatkan untuk memastikan jumlah keluarga tidak lagi buang air besar sembarangan semakin berkurang lagi dikemudian hari.
- c. Persentase Keluarga yang Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
Persentase keluarga yang melaksanakan PHBS telah mencapai target sebesar 71,0% pada semester pertama tahun 2023 dari target 70% pada tahun 2023. Melalui perilaku hidup bersih dan sehat yang dilakukan setiap keluarga, diharapkan dapat mengurangi risiko stunting pada keluarga tersebut sebagai pencegahan terkenanya penyakit menular dan infeksi yang dapat dicegah dengan perilaku PHBS.
- d. Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki minimal 20 Tenaga Pelatih berjenjang tingkat Dasar serta pendidikan dan pelatihan pengasuhan stimulasi penanganan stunting bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Sampai dengan semester pertama tahun 2023, jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 20 Tenaga Pelatih berjenjang tingkat Dasar serta pendidikan dan pelatihan pengasuhan stimulasi penanganan stunting bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) telah mencapai 83,6% dari target 100% atau 11 kabupaten/kota pada tahun 2023. Bagi kabupaten/ kota yang capaiannya belum optimal, dapat melaksanakan pelatihan bagi tenaga pelatih berjenjang tingkat dasar dan pengasuhan stimulasi penanganan stunting bagi guru PAUD pada sisa waktu menuju tahun 2023.

- e. Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki guru PAUD terlatih Pengasuhan stimulasi penanganan stunting sebagai hasil pendidikan dan pelatihan di kabupaten/kota
Desa dan kelurahan yang memiliki guru PAUD terlatih Pengasuhan stimulasi penanganan stunting sebagai hasil pendidikan dan pelatihan di kabupaten/kota mencapai 48,9% dari target 90% pada tahun 2023. Tentu saja capaian tersebut masih relatif rendah. Untuk itu, Desa dan Kelurahan perlu segera melakukan terobosan dan strategi yang tepat untuk merekrut guru PAUD terlatih Pengasuhan stimulasi penanganan stunting sebagai hasil pendidikan dan pelatihan di kabupaten/kota pada tahun 2023.
- f. Persentase Lembaga PAUD yang Mengembangkan PAUD-HI (Holistik Integratif)
Capaian 56,6% pada semester satu tahun 2023 dari target 70% tahun 2023 untuk Lembaga PAUD yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini-Holistik Integratif (PAUD-HI) memberikan optimisme untuk mencapai target pada tahun 2023. Semester kedua tahun 2023 dan tahun 2024 dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan capaian target melalui upaya pemenuhan persyaratan status PAUD menjadi PAUD-HI.
- g. Terpenuhinya Standar Pelayanan Pemantauan Tumbuh Kembang di Posyandu
Capaian atas pemenuhan standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di Posyandu sampai dengan semester pertama tahun 2023 sebesar 80,6% dari target 90% pada tahun 2023. Capaian ini perlu ditingkatkan pada periode semester kedua tahun 2023 dan tahun 2024. Untuk itu, pemerintah kabupaten/kota dan K/L terkait perlu terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan dalam pelayanan pemantauan tumbuh kembang yang terstandar di Posyandu.
- h. Persentase Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Kelas BKB tentang Pengasuhan 1.000 HPK
Desa/Kelurahan yang melaksanakan kelas BKB tentang Pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) telah mencapai 92,7% dari target 90% pada semester kedua tahun 2023. Disamping itu, Desa/Kelurahan perlu terus mengoptimalkan BKB yang ada untuk melaksanakan kelas BKB tentang pengasuhan 1.000 HPK. Materi 1.000 HPK penting dipahami oleh keluarga Balita oleh TPK yang telah mendapatkan materi 1.000 HPK pada orientasi TPK tahun 2023 yang dilaksanakan bulan April-Mei 2023.

- i. Persentase Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang Mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi
Pada semester pertama tahun 2023, capaian Persentase Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang Mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi sebanyak 74,7% dari target 90% pada semester kedua tahun 2023. Diharapkan pada semester kedua selisih antara capaian dan target dapat dipenuhi secara optimal. Kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) merupakan proses belajar secara terstruktur untuk mempercepat terjadinya perubahan perilaku pada KPM PKH. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan KPM dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan perubahan perilaku mengenai pentingnya pengasuhan dan pendidikan anak, kesehatan, pengelolaan keuangan, perlindungan anak dan kesejahteraan sosial dalam lingkup keluarga.
- j. Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja yang Melaksanakan Edukasi Kesehatan Reproduksi dan Gizi bagi Remaja
Capaian PIK remaja dan BKR yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi Remaja pada semester pertama tahun 2023 mencapai 84,7% dari target 90% pada semester kedua tahun 2023. Kegiatan ini penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran Remaja tentang kesehatan reproduksi dan gizi agar pada saat memasuki jenjang perkawinan dan melahirkan, mereka menghasilkan bayi yang sehat dan cerdas. Mengingat pentingnya kegiatan ini, maka PIK Remaja perlu terus didorong untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi Remaja bukan semata-mata untuk mencapai target tetapi yang lebih penting lagi adalah agar para pasangan keluarga muda Indonesia di masa depan adalah mereka yang paham dan sadar pentingnya kesehatan reproduksi dan gizi untuk membangun generasi yang sehat dan berkualitas.
- k. Persentase Pasangan Calon Pengantin yang Mendapatkan Bimbingan Perkawinan dengan Materi Stunting
Pemahaman calon pengantin tentang stunting sangat penting. Sebagai calon pengantin, mereka harus memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana mencegah terjadinya potensi melahirkan bayi stunting. Itulah sebabnya bimbingan perkawinan bagi pasangan calon pengantin tentang stunting dilakukan sebelum dilangsungkannya perkawinan. Sampai dengan semester pertama tahun 2023, capaian persentase pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting sebesar 88,2% dari target 90% tahun 2023. Meskipun capaian ini belum optimal, maka pada semester kedua dan tahun 2024 kegiatan bimbingan

perkawinan bagi pasangan calon pengantin perlu terus ditingkatkan agar menjangkau seluruh pasangan calon pengantin.

3.3 Pilar 3. Peningkatan Konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa



Grafik 3. 3 Capaian dan Target Peningkatan Konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

- a. Melaksanakan Konvergensi dalam Perencanaan dan Penganggaran, serta Pelaksanaan Kegiatan untuk Meningkatkan Jenis, Cakupan dan Kualitas Gizi di tingkat Pusat dan Daerah.

Penguatan konvergensi di Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, 11 Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa yang selama ini telah dilaksanakan perlu dioptimalkan dalam perencanaan program dan kegiatan dengan mengintegrasikan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran daerah (RPJPD, RPJMD, RAD Pangan dan Gizi, APBD dan RKAD) di masing-masing tingkatan pemerintahan daerah. Sehubungan dengan itu, perlu dilakukan tagging anggaran Percepatan Penurunan Stunting yang lebih difokuskan kepada pemenuhan kebutuhan keluarga berisiko stunting dan balita stunting. Pada semester pertama tahun 2023, capaian jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang mengintegrasikan program dan kegiatan PPS dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (RPJPD, RPJMD, RAD Pangan dan Gizi, APBD dan RKAD) telah mencapai 87,89% dari target 100% pada tahun 2023.

- b. Persentase Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting
Sesuai Perpres 72 tahun 2021, Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan kegiatan ini dan melaporkan kepada Ditjen Bangda Kemendagri. Berdasarkan laporan TPPS kabupaten/kota, capaian persentase kabupaten/kota yang melaksanakan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting sebesar 100% dari target 100%. Kegiatan ini masih perlu dilakukan dan tingkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan sebagai salah satu kriteria kinerja pemerintah dalam percepatan penurunan stunting.
- c. Persentase Desa/Kelurahan yang Mengintegrasikan Program Dan Kegiatan PPS dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Desa/Kelurahan (RPJMDesa, RKPDesa, APBDDesa, dan RKADesa
Seperti halnya indikator Kabupaten/Kota Pemerintah Desa/kelurahan juga diharapkan dapat mengintegrasikan program dan kegiatan PPS dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Desa/Kelurahan. Pada capaian semester I tahun 2023, didapatkan capaian sebesar 98,6% dari target 100% pada Tahun 2023. Harapannya semester kedua dapat dioptimalkan untuk pencapaian target tersebut, khususnya pada Pemerintah Kelurahan yang pada umumnya menjadi selisih dari capaian tersebut. Pemerintah Desa/Kelurahan menjadi lembaga pemerintah terdekat dengan masyarakat, sehingga melalui Desa/Kelurahan dapat mengatasi permasalahan stunting dan pelaksanaan intervensi serta pencegahannya.
- d. Persentase Desa/Kelurahan yang Meningkatkan Alokasi Dana Desa/Kelurahan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam Penurunan Stunting
Pada posisi semester pertama tahun 2023, capaian Persentase Desa/Kelurahan yang Meningkatkan Alokasi Dana Desa/ Kelurahan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam Penurunan stunting sebesar 86,9% dari target 90% tahun 2023. Diharapkan pada semester kedua tahun 2023 dan tahun 2024, 90% dari seluruh desa/kelurahan mengalokasikan dana desa/kelurahan untuk intervensi spesifik dan sensitif dalam percepatan penurunan stunting. Untuk itu, optimalisasi capaian indikator Pilar 1 mengenai adanya kebijakan/peraturan Bupati/Walikota tentang kewenangan Desa/Kelurahan dalam penurunan stunting.
- e. Persentase Desa/Kelurahan yang Melakukan Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting
Capaian persentase desa/kelurahan yang melakukan konvergensi percepatan penurunan stunting sebesar 100% dari target 80% tahun 2022. Hal ini tentu didorong dari kegiatan dan kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota baik secara langsung maupun tidak langsung. BKKBN telah membentuk Kampung KB dan salah satu programnya yaitu DAHSAT

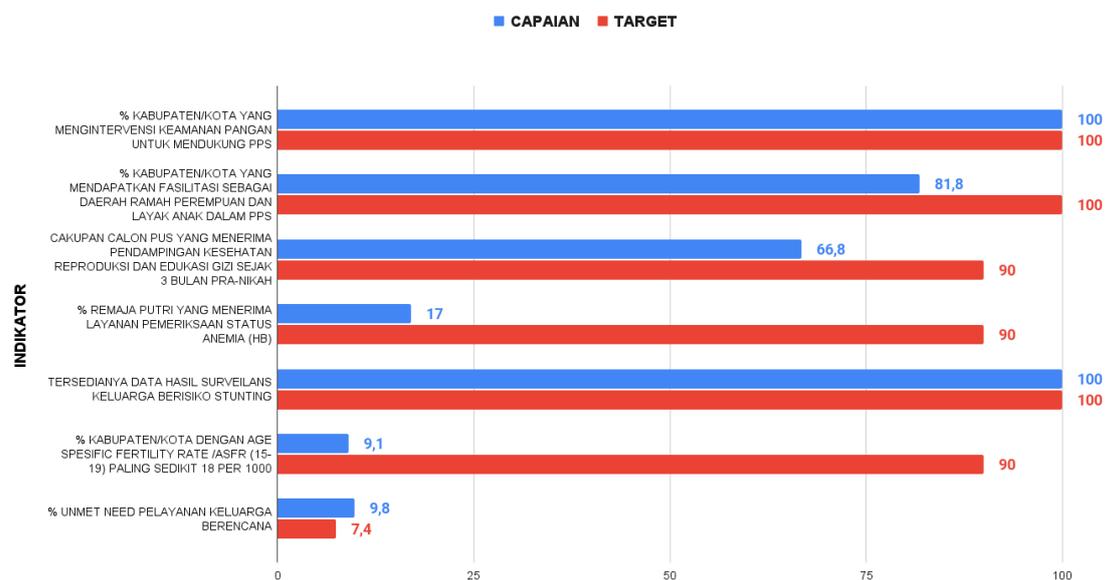
merupakan suatu kegiatan konvergensi dalam percepatan penurunan stunting. Hal ini juga didorong dari adanya kebijakan/peraturan Bupati/Walikota tentang kewenangan Desa/Kelurahan dalam penurunan stunting.

f. Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat (STBM)

Capaian persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM pada semester satu Tahun 2023 mencapai 94,2% dari target 100% pada tahun 2023. Capaian ini masih terdapat selisih 5,6% yang akan dikejar pada tahun 2023 semester kedua. Kegiatan ini harapannya dapat mengurangi salah satu faktor risiko stunting mulai dari Desa/Kelurahan.

g. Persentase Calon Pengantin/Calon Ibu yang Menerima Tablet Tambah Darah (TTD)

Capaian persentase Calon Pengantin/ Calon Ibu yang Menerima Tablet Tambah Darah (TTD) pada semester pertama tahun 2023 sebesar 48,7% dari target 90% tahun 2023. Masih belum optimalnya capaian indikator ini, maka perlu dilakukan 2 (dua) hal penting, yaitu 1) meningkatkan pemahaman bagi calon Pengantin/Calon Ibu melalui sosialisasi berbagai platform media, edukasi di kantor KUA, di tempat pendaftaran perkawinan, atau di fasilitas lain, 2) memastikan ketersediaan TTD yang cukup dan merata yang mudah dijangkau oleh Calon Pengantin.



Grafik 3. 4 Capaian dan Target Kabupaten/Kota dalam Intervensi Keamanan Pangan dan Indikator lainnya

h. Persentase Kabupaten/Kota yang Mengintervensi Keamanan Pangan untuk Mendukung Percepatan Penurunan Stunting

Jika kita cermati dari capaian indikator ini pada semester pertama tahun 2023 telah mencapai 100% dari target 100% pada tahun 2023, maka upaya yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota yang mengintervensi keamanan pangan yang

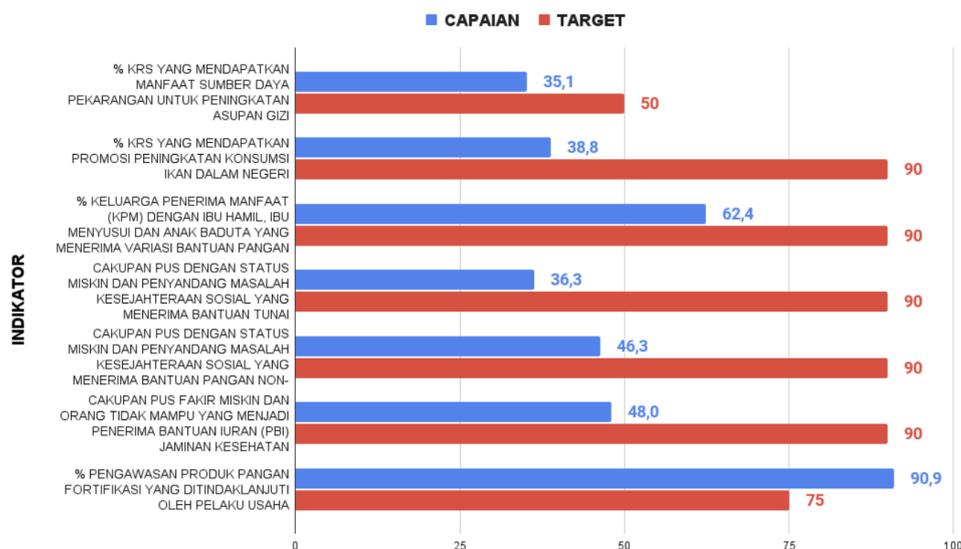
mendukung percepatan penurunan stunting sudah menunjukkan hasil yang optimal. Diharapkan kondisi ini dapat terus terjaga demi keamanan pangan di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

- i. Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan fasilitasi sebagai daerah ramah perempuan dan layak anak dalam Percepatan Penurunan Stunting Terdapat sekitar 81,8% atau 9 Kabupaten/Kota dari target 100% atau 11 Kabupaten/Kota yang mendapatkan fasilitasi sebagai daerah ramah perempuan dan layak anak dalam Percepatan Penurunan Stunting. Tentu saja diharapkan pada semester kedua tahun 2023, akan semakin ditingkatkan capaian Kabupaten/Kota yang mendapatkan fasilitasi sebagai daerah ramah perempuan dan layak anak dalam Percepatan Penurunan Stunting. Dengan status tersebut, Kabupaten/Kota diharapkan kebijakan dan implementasi program dan kegiatan yang inovatif dalam mendukung sinergi untuk mewujudkan perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia Maju dengan prevalensi stunting yang rendah.
- j. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah Pada semester pertama tahun 2023, capaian cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah berdasarkan data Aplikasi Elsimil mencapai 66,8% dari target 90% semester satu tahun 2023. Capaian ini perlu dioptimalkan untuk mencapai target di akhir tahun 2023. Dengan selisih capaian sebesar 23.2% mengindikasikan bahwa calon PUS yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi 3 bulan pranikah masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh belum kuatnya regulasi pemerintah daerah dan masih belum optimalnya informasi terkait pendampingan calon pengantin 3 bulan pra nikah oleh Tim Pendamping Keluarga. Padahal pemahaman calon PUS tentang kedua substansi tersebut sangat penting dalam pencegahan agar tidak berpotensi melahirkan bayi stunting. Untuk itu, pendampingan calon PUS oleh TPK terutama melalui pendampingan KIE tentang kesehatan reproduksi dan edukasi gizi perlu ditingkatkan sejak 3 bulan pranikah. Hal penting lainnya yang harus dilakukan adalah agar optimalisasi aplikasi elsimil di KUA, tempat ibadah agama selain Islam dimana pencatatan pernikahan dilaksanakan.
- k. Persentase Remaja Putri yang Menerima Layanan Pemeriksaan Status Anemia (Hemoglobin) Capaian indikator persentase remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin) baru mencapai 17% pada semester pertama tahun 2023 dari target 90% tahun 2023. Rendahnya capaian indikator ini perlu mendapat perhatian dari semua pihak, mengingat penting dan

urgennya pemeriksaan remaja putri untuk memastikan status anemia sebelum memasuki jenjang pernikahan. Dalam upaya meningkatkan cakupan pemeriksaan status anemia remaja putri, maka perlu sosialisasi dan edukasi kepada remaja putri dan keluarga melalui berbagai platform media yang akrab dengan mereka. Dalam hal pelayanan pemeriksaan, Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya perlu memberikan pelayanan yang optimal.

- I. Tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko stunting
Pada semester pertama tahun 2023, capaian tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko stunting mencapai 100% dari target 100%. Ketersediaan data hasil surveilans sangat penting terutama untuk lebih memahami kondisi dan status Keluarga Berisiko Stunting sebagai bahan intervensi melalui program dan kegiatan yang tepat sesuai dengan kondisi KRS terkini.
- m. Persentase kabupaten/kota dengan *Age Specific Fertility Rate* (15-19) sampai 18 per 1000
Kabupaten/kota dengan *Age Specific Fertility Rate* (15-19) sampai 18 per 1000 sebesar 9,1% dari target 90% semester kedua tahun 2023. Upaya untuk menurunkan ASFR perlu terus dioptimalkan agar jumlah ASFR (15-19) makin sedikit dari waktu ke waktu. Pentingnya menurunkan ASFR bukan hanya soal mencapai target atau belum, tetapi terkait juga dengan dampak kurang baik terhadap kesehatan ibu belia maupun anak yang dilahirkannya.
- n. Persentase Unmet Need Pelayanan Keluarga Berencana
Pada posisi semester pertama tahun 2023, capaian persentase unmet need pelayanan keluarga berencana mencapai 9,8% dari target 7,4% tahun 2024. Angka ini mengindikasikan upaya untuk mencapai target perlu kerja keras dari berbagai pihak terkait. Masih tingginya angka unmet need, penyebab secara umum karena demand yang tinggi tetapi suplai yang rendah. Tingginya demand sebagai hasil sosialisasi, promosi atau kesadaran sendiri para calon peserta KB untuk menggunakan alat dan obat kontrasepsi sesuai pilihannya. Disisi lain demand yang tinggi belum dibarengi dengan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi serta kemudahan untuk memperoleh pelayanan KB. Hal utama yang perlu dilakukan diantaranya adalah optimalisasi penyediaan alat dan obat kontrasepsi di fasilitas kesehatan terdekat dengan lokasi tempat tinggal PUS yang sesuai dengan minat dan animo mereka serta mudah dijangkau dan tepat waktu, tepat sasaran, serta tepat jumlah.

3.4 Pilar 4. Peningkatan Ketahanan Pangan dan Gizi pada Tingkat Individu, Keluarga, dan Masyarakat



Grafik 3. 5 Capaian dan Target Peningkatan Ketahanan Pangan dan Gizi pada Tingkat Individu, Keluarga, dan Masyarakat

- a. Persentase Keluarga Berisiko Stunting yang Mendapatkan Manfaat Sumber Daya Pekarangan untuk Peningkatan Asupan Gizi
 Persentase Keluarga Berisiko stunting yang Mendapatkan Manfaat Sumber Daya Pekarangan untuk Peningkatan Asupan Gizi. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan non-tunai. Capaian terhadap target persentase keluarga berisiko stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi pada semester pertama tahun 2023 sebesar 35,1% dari target 50% tahun 2023. Capaian tersebut masih relatif rendah meskipun masih ada waktu sampai tahun 2024. Untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi bagi keluarga berisiko stunting perlu optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai upaya untuk mendukung diversifikasi pangan sehingga masyarakat khususnya keluarga berisiko stunting dapat mengonsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA). TP PKK dan Dinas terkait di semua tingkatan dapat berperan dalam mengembangkan program.

- b. Persentase Keluarga Berisiko Stunting yang Mendapatkan Promosi Peningkatan Konsumsi Ikan Dalam Negeri
 Pada semester pertama tahun 2023, capaian persentase keluarga berisiko stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri sebesar 38,8% dari target 90% tahun 2023. Capaian tersebut masih relatif

rendah sehingga pada semester kedua tahun 2023 perlu optimalisasi promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri. Masyarakat perlu edukasi tentang manfaat mengonsumsi ikan dalam negeri untuk pencegahan stunting. Edukasi dapat dilakukan melalui kampanye dan sosialisasi melalui media mainstreaming dan media sosial. Edukasi konsumsi ikan dalam negeri juga dapat dilakukan oleh TPK melalui komunikasi kelompok dan interpersonal.

- c. Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Anak Berusia di bawah dua tahun (Baduta) yang menerima variasi Bantuan Pangan

Pada posisi semester pertama tahun 2023, Keluarga Berisiko Stunting sebagai Penerima Manfaat yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur mencapai 62,4% dari target 90% tahun 2023. Capaian ini mengindikasikan bahwa cakupan jumlah Penerima Manfaat masih jauh dari harapan. Untuk itu, capaian indikator ini perlu diperluas dan ditingkatkan pada semester kedua tahun 2023 dan tahun 2024, melalui Dinas terkait, Donasi, BAAS, PMT dan sebagainya.

- d. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan Sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat

Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat baru mencapai 36,3% pada semester pertama tahun 2023 dari target 90% tahun 2023. Angka ini mengindikasikan bahwa kelompok PUS ini perlu memperoleh perhatian ekstra untuk mendapat bantuan tunai bersyarat. Sudah seharusnya PUS kategori ini menjadi prioritas dalam penyaluran bantuan bersyarat. Untuk itu, kementerian/lembaga, pemerintah daerah meningkatkan cakupan bantuan bersyarat bagi keluarga yang termasuk pada golongan ini. Bagi mereka, bantuan bersyarat sangat berarti dan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

- e. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan non-tunai

Capaian pada semester pertama tahun 2023 ini, Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan non-tunai mencapai 46,4% dari target 90% target tahun 2023. Capaian ini relatif sama dengan cakupan bantuan tunai bersyarat. Sekali lagi, PUS kategori ini perlu memperoleh perhatian ekstra karena bagi mereka, bantuan pangan non-tunai seperti juga bantuan tunai bersyarat sangat berarti untuk menopang kebutuhan keluarganya dalam memenuhi kebutuhan pangan kesehariannya. Untuk itu, sudah selayaknya semua pihak terutama pemerintah dan pemerintah daerah yang diberi mandat oleh undang-undang untuk melindungi keluarga miskin dan penyandang

masalah kesejahteraan sosial memperoleh hak-haknya agar mereka tidak terlantar.

- f. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan

Seperti halnya 2 (dua) indikator sebelumnya, indikator Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan juga harus menjadi perhatian utama pemerintah dan pemerintah daerah dalam membantu kebutuhan hidup sehari-hari. Pada semester pertama tahun 2023, capaian indikator ini mencapai 48,8% dari target 90% tahun 2023.

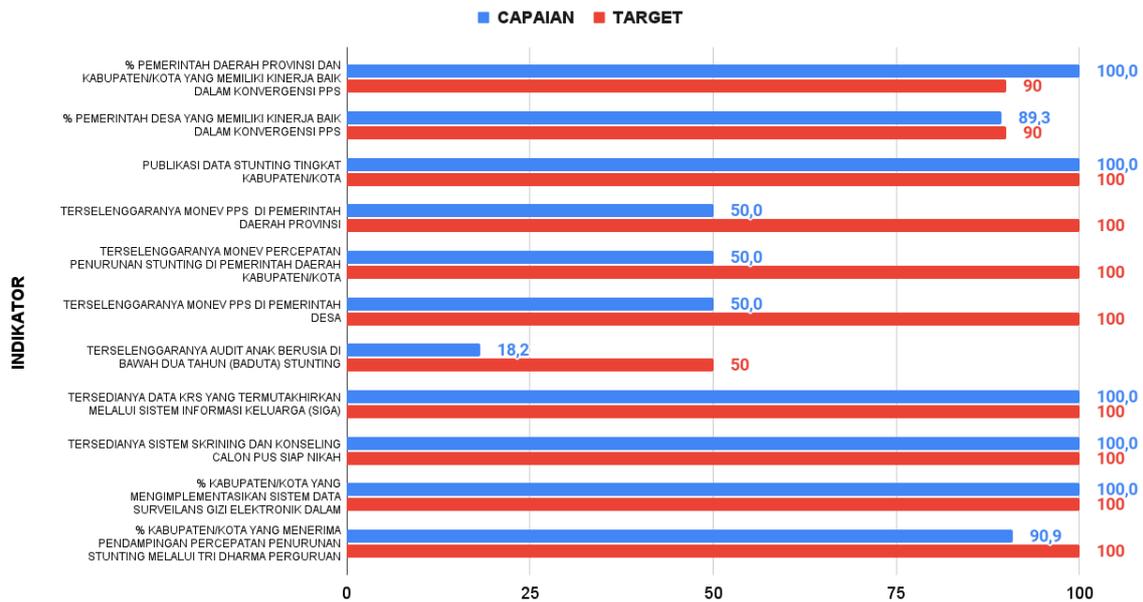
Meskipun capaian indikator ini belum optimal, namun dengan capaian 48,8% pada semester pertama tahun 2023 dari target 90% tahun 2024, sudah memberikan indikasi bahwa pemerintah dan pemerintah daerah telah menunjukkan upaya dalam memenuhi kebutuhan Pasangan Usia Subur fakir miskin dan orang tidak mampu dengan program Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan. Ke depan, bantuan pemerintah dan pemerintah daerah terhadap Pasangan Usia Subur fakir miskin dan orang tidak mampu perlu makin dioptimalkan lagi agar semakin banyak Pasangan Usia Subur fakir miskin dan orang tidak mampu memperoleh program Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan agar mereka terentaskan dari kemiskinan. Disadari bahwa capaian ketiga indikator di atas didasarkan atas bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah melalui APBN dan APBD. Sangat mungkin dukungan dan bantuan dari masyarakat, perusahaan dan donatur lain kepada ketiga kategori sasaran tersebut terjadi, namun tidak dilaporkan sebagaimana dana yang bersumber dari anggaran negara.

- g. Persentase pengawasan produk pangan fortifikasi yang ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha

Capaian pada semester pertama tahun 2023 untuk indikator Persentase pengawasan produk pangan fortifikasi yang ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha mencapai 90,6% dari target 75% tahun 2023. Angka ini mengindikasikan keberhasilan melakukan pengawasan yang intensif dari lembaga yang memiliki kewenangan sekaligus sebagai penanggung jawab atau pengampu indikator ini yang memastikan Pelaku usaha memiliki kepatuhan dalam menindaklanjuti dari setiap hasil pengawasan produk pangan olahan yang dilakukan dengan fortifikasi pangan.

3.5 Penguatan dan Pengembangan Sistem Data, Informasi, Riset, dan Inovasi

Penguatan dan pengembangan sistem data, informasi, riset, dan inovasi pada pilar 5 dapat dilihat sebagai berikut.



Grafik 3. 6 Penguatan dan pengembangan sistem data, informasi, riset, dan inovasi

Berdasarkan grafik yang menggambarkan capaian dan target penguatan dan pengembangan sistem data, informasi, riset, dan inovasi tersebut, diperoleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Persentase Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi Percepatan Penurunan stunting
 Pada semester pertama tahun 2023 indikator Persentase Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi Percepatan Penurunan Stunting mencapai 100% dari target 90% tahun 2023. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi telah meningkatkan kinerjanya dalam percepatan penurunan stunting. Tahun 2022 Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota mendapatkan penghargaan bantuan dana insentif daerah (DID). Dengan penghargaan ini dilakukan akan memacu pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerjanya dalam program percepatan stunting.
2. Persentase Pemerintah Desa yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi Percepatan Penurunan Stunting
 Capaian indikator persentase pemerintah desa yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi percepatan penurunan stunting mencapai 89,3% dari target 90% tahun 2023. Capaian semester pertama tahun 2023 ini relatif memberi harapan untuk mencapai target, dengan catatan perlu optimal lagi dalam meningkatkan 1) peran pelaku dan lembaga yang ada di Desa, 2) memfasilitasi perencanaan pembangunan desa untuk pengembangan kegiatan pencegahan stunting, 3) mengoordinasikan implementasi program masuk ke desa, 4) memobilisasi pendamping desa untuk turut memfasilitasi pengembangan

- program stunting, dan 5) mendorong penggunaan Dana Desa untuk mendukung program percepatan penurunan stunting.
3. Publikasi data stunting tingkat kabupaten/kota
Indikator ini menekankan adanya satu kali publikasi data stunting tingkat kabupaten/ kota. Capaian Publikasi data stunting tingkat kabupaten/kota pada semester 1 tahun 2023 mencapai 100% atau seluruh kabupaten/ kota telah melaksanakan publikasi data stunting. Diharapkan kabupaten/kota tetap melakukan dan melaksanakan kegiatan publikasi merealisasikan pada semester kedua tahun 2023 ini. Pentingnya data stunting dipublikasikan kepada publik akan memberikan informasi tentang kondisi stunting di daerahnya. Bagi instansi terkait, data tersebut menjadi bermakna baik sebagai bahan analisis untuk menemukan masalah dan kendala untuk kemudian dijadikan intervensi dalam pemecahan masalah stunting.
 4. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting
Capaian indikator terselenggaranya pemantauan dan evaluasi strategi nasional percepatan penurunan stunting sebesar 50% dari target 2 kali dalam setahun. Ini berarti bahwa perlu kegiatan pemantauan dan evaluasi ini dilakukan lebih optimal lagi pada semester kedua tahun 2023. Pemantauan dan evaluasi strategi nasional percepatan penurunan stunting penting dilakukan karena untuk memastikan strategi yang dilaksanakan sekarang ini baik atau perlu penyesuaian untuk kemudian dilakukan penyesuaian guna mengoptimalkan capaian indikator-indikator yang diamanatkan dalam Perpres 72 tahun 2021 dan RAN-PASTI.
 5. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Pemerintah Daerah Provinsi
Pada semester pertama tahun 2023 ini, capaian indikator terselenggaranya pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan stunting di pemerintah provinsi sebesar 50% dari target 2 kali dalam setahun. Ini berarti bahwa ada pemerintah telah melaksanakan satu kali pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan stunting pada semester pertama tahun ini. Untuk itu, pemerintah provinsi akan melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi satu kali lagi pada semester kedua. Pemantauan dan evaluasi perlu dilakukan untuk mengetahui kendala dan hambatan dalam melakukan intervensi spesifik, intervensi sensitif dan melaksanakan strategi nasional pada pilar 1 sampai pilar 5 untuk dijadikan bahan perbaikan pada semester kedua.
 6. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Pemerintah Daerah kabupaten/kota
Capaian indikator terselenggaranya pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan stunting di pemerintah daerah kabupaten/kota pada semester pertama tahun 2023 sebesar 50% dari target 100% tahun 2023. Capaian ini mengindikasikan telah dilaksanakan satu kali kegiatan untuk pemantauan dan evaluasi PPS di kabupaten/kota. Diharapkan pada semester kedua tahun 2023

mencapai target yang telah ditetapkan. Hasil pemantauan dan evaluasi tersebut diharapkan dapat ditelaah dan dianalisis untuk perbaikan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting pada semester kedua tahun 2023 menuju target 12% tahun 2024 di Provinsi Jambi.

7. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Pemerintah Desa

Kegiatan pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan stunting di pemerintah desa/kelurahan pada semester pertama tahun 2023 mencapai 50% dari target 100% tahun 2023. Capaian ini perlu ditingkatkan pada semester kedua tahun 2023 untuk memastikan kendala, hambatan dan masalah pelaksanaan percepatan penurunan stunting di level desa/kelurahan dapat dipantau secara optimal untuk dibahas dan disepakati solusinya pada forum rembug stunting tingkat desa/kelurahan. Jika ada kendala dan hambatan belum bisa ditangani di tingkat desa/kelurahan, dapat dibahas pada forum Mini Lokakarya di tingkat kecamatan.

8. Terselenggaranya audit anak berusia di bawah dua tahun (baduta) stunting

Capaian indikator terselenggaranya audit anak berusia di bawah dua tahun (baduta) stunting pada posisi semester pertama tahun 2023 sebesar 18,2% dari target 50%. Selisih sebesar 31,8% antara capaian dan target, tentunya memberikan membutuhkan kinerja bersama pada semester kedua tahun 2023 dengan catatan seluruh tahapan Audit Kasus Stunting (AKS) dilaksanakan secara ketat sesuai dengan siklus waktu yang telah disepakati. Kegiatan (AKS) merupakan salah satu kegiatan prioritas dalam program percepatan penurunan stunting. Hal ini untuk memitigasi kejadian stunting bagi Baduta dan untuk memastikan bahwa kasus-kasus serupa tidak terulang kembali.

9. Tersedianya data keluarga risiko stunting yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA)

Posisi pada semester pertama tahun 2023 ini, tersedianya data keluarga risiko stunting yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA) mencapai 100% dari target 100% tahun 2023. Sesungguhnya, pemutakhiran data ini dilakukan 2 (dua) kali setahun atau setiap semester. Capaian tersebut perlu dipertahankan pada semester kedua tahun 2023 dan tahun 2024, mengingat data keluarga risiko stunting harus termutakhirkan. Ketersediaan data yang akurat dan tepat waktu menjadi prasyarat utama untuk keperluan intervensi baik layanan spesifik, sensitif maupun pilar 1 sampai pilar 5.

10. Persentase kabupaten/kota yang mengimplementasikan sistem data surveilans gizi elektronik dalam Pemantauan intervensi gizi untuk penurunan stunting

Capaian indikator kabupaten/kota yang mengimplementasikan sistem data surveilans gizi elektronik dalam pemantauan intervensi gizi untuk penurunan stunting sebesar 100% dari target 100% tahun 2023. Implementasi data surveilans gizi elektronik oleh kabupaten/kota sangat penting dalam menunjang pelaksanaan pemantauan intervensi gizi dalam rangka percepatan penurunan stunting. Diharapkan capaian ini dapat dipertahankan pada

semester kedua tahun 2023, maka diperlukan data surveilans digunakan pada kegiatan pemantauan intervensi gizi dapat dimaksimalkan untuk percepatan penurunan stunting.

11. Melakukan penguatan riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi

Indikator persentase kabupaten/kota yang menerima pendampingan percepatan penurunan stunting melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi mencapai 90,9% dari target 100%. Capaian ini mengindikasikan perlunya optimalisasi Perguruan Tinggi melalui Tri Dharma dalam melakukan pendampingan kepada seluruh kabupaten/kota tentang program percepatan penurunan stunting baik dalam hal jumlah perguruan tinggi maupun cakupan kabupaten/ kota yang terdampingi. Diharapkan pada semester kedua tahun 2023, selisih capaian dari kabupaten/kota yang memperoleh pendampingan dari perguruan tinggi tentang program percepatan penurunan stunting.

BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1 Mini Lokakarya Kecamatan

Pelaksanaan kegiatan mini lokakarya kecamatan sampai semester I tahun 2023 dirincikan sebagai berikut.

Tabel 4. 1 Capaian Kegiatan Mini Lokakarya Kecamatan

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	TARGE T	REALISAS I	PERSENTASE (%)
1	KOTA JAMBI	11	110	44	40
2	MUARO JAMBI	11	110	44	40
3	TANJUNG JABUNG TIMUR	11	110	33	30
4	TANJUNG JABUNG BARAT	13	130	50	38
5	BATANG HARI	8	80	16	20
6	SAROLANGUN	10	100	0	0
7	TEBO	12	120	43	36
8	BUNGO	17	170	10	6
9	MERANGIN	24	240	96	40
10	KERINCI	18	180	0	0
11	KOTA SUNGAI PENUH	8	80	16	20
JUMLAH		143	1.430	352	25

Pada laporan percepatan penurunan stunting semester I ini, Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan minilokakarya sebanyak 352 dari 1.430 yang ditargetkan. Jika dipersentasekan masih 25% dari keseluruhan jumlah pelaksanaan minilokakarya. Ada dua Kabupaten/Kota yang sama sekali belum melaksanakan minilokakarya yaitu Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Kerinci. Hal ini penting untuk diperhatikan karena pelaksanaan belum sama sekali terlaksana, kendala dan hambatan yang dihadapi seperti pendanaan seharusnya dapat disiasati dan dicarikan solusinya. Sedangkan Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan minilokakarya dengan capaian

yang cukup tinggi dengan persentase 40% yaitu Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Merangin.

4.2 Audit Kasus Stunting

Pelaksanaan audit kasus stunting (AKS) sampai semester I tahun 2023 dirincikan sebagai berikut.

Tabel 4. 2 Capaian Kegiatan Audit Kasus Stunting

NO.	KABUPATEN/KOTA	JADWAL PELAKSANAAN
1	Kota Sungai Penuh	16 Juni 2023
2	Kota Jambi	21 Juni 2023
3	Tanjung Jabung Barat	26 Juli 2023
4	Merangin	31 Agustus 2023
5	Tanjung Jabung Timur	31 Agustus 2023
6	Bungo	05 September 2023
7	Tebo	14 September 2023
8	Batang Hari	15 September 2023
9	Muaro Jambi	20 September 2023
10	Kerinci	21 September 2023
11	Sarolangun	19 Oktober 2023

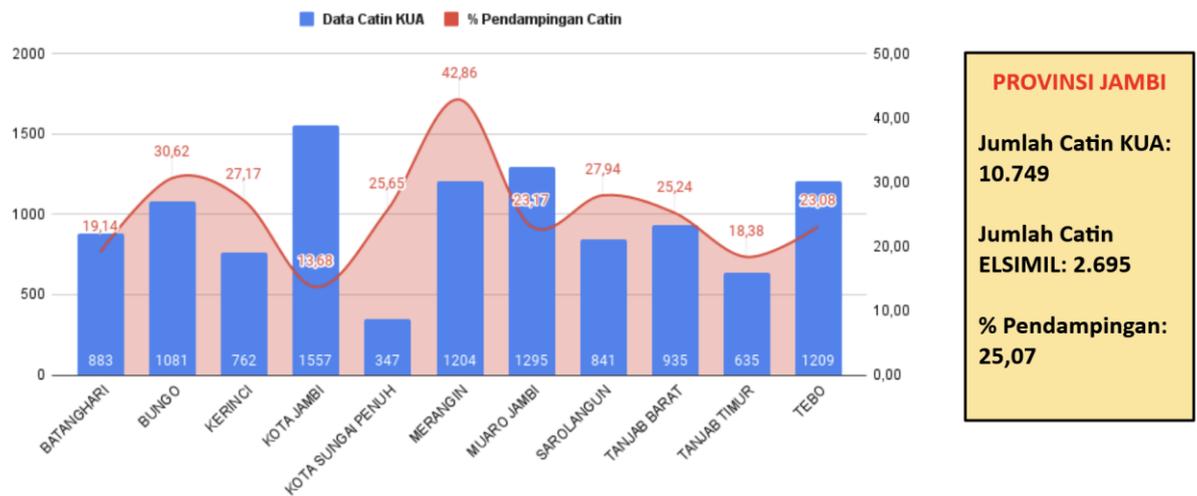
Keterangan:

	: Terlaksana
	: Rencana

Audit Kasus Stunting merupakan salah satu kegiatan prioritas dalam Rencana Aksi Nasional. Pentingnya Audit Kasus Stunting untuk menggali masalah mengenai faktor-faktor risiko dari sasaran Calon Pengantin, Ibu Hamil, Ibu Melahirkan, Baduta, maupun Balita. dan memiliki dampak yang besar dan signifikan dalam percepatan penurunan stunting. Hanya ada dua kabupaten/kota yang telah melaksanakan Audit Kasus Stunting Tahap I yaitu Kota Sungai Penuh dan Kota Jambi pada Bulan Juni. Sedangkan yang lainnya direncanakan pada bulan Juli-Oktober. Jadwal perencanaan ini ada yang sudah terlambat dari jadwal target yang ditentukan.

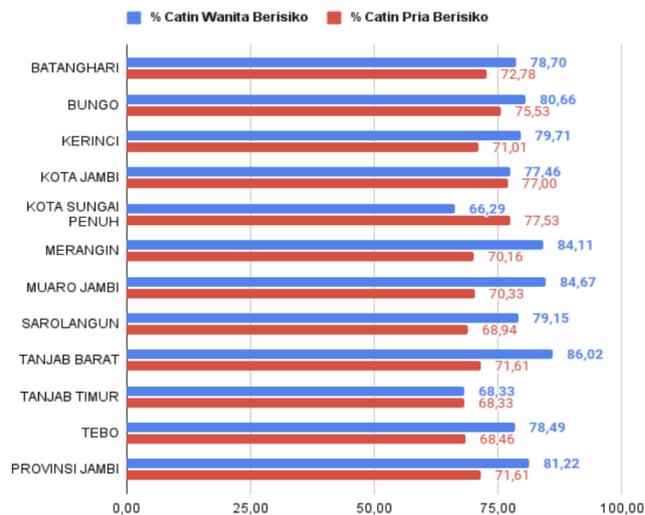
4.3 Pendampingan Tim Pendamping Keluarga (TPK)

a. Pendampingan calon pengantin



Grafik 4. 1 Capaian Pendampingan TPK pada Calon Pengantin

Data Calon Pengantin dari KUA memiliki 10.749 Catin, sedangkan Jumlah Catin yang terdaftar di Aplikasi ELSIMIL sebesar 2.695 Catin. Kedua datanya hendaknya sinkron agar data sasaran menjadi homogen. Namun pada kenyataannya masih terdapat selisih yang cukup besar yaitu 8.054 Catin yang masih belum terdaftar di Aplikasi ELSIMIL. Koordinasi dan Fasilitasi dengan memberikan arahan kepada Catin diperlukan agar semua Catin dapat terdaftar pada Aplikasi ELSIMIL. Skrining pada Calon Pengantin penting untuk dilakukan karena nantinya akan melahirkan generasi mendatang. Hal ini juga termasuk dalam pencegahan karena hasil dari ELSIMIL mengeluarkan ideal atau berisiko dan dilakukan pendampingan oleh TPK. Berdasarkan data diatas, persentase pendampingan masih sebesar 25,07%. Pendampingan Catin yang terbesar berada di Kabupaten Merangin sebesar 42,86% dan yang terendah yaitu Kota Jambi sebesar 13,68%. Kota Jambi meskipun merupakan wilayah yang cukup strategis namun dalam hal pendampingan masih relatif rendah. Faktor-faktor yang dapat menjadi penyebabnya yaitu karena status sosial ekonomi serta pengetahuan masyarakat. Berikut merupakan data Calon Pengantin Berisiko dan Calon Pengantin Pria Berisiko.



PENGANTIN WANITA BERISIKO: 2.189

- Terlalu Muda : 468 (21,37%)
- Terlalu Tua : 80 (3,65)
- Kurus (IMT) : 403 (19,29%)
- Anemia : 507 (24,26%)
- KEK (LILA) : 521 (24,94%)
- Terpapar Rokok : 663 (31,73%)

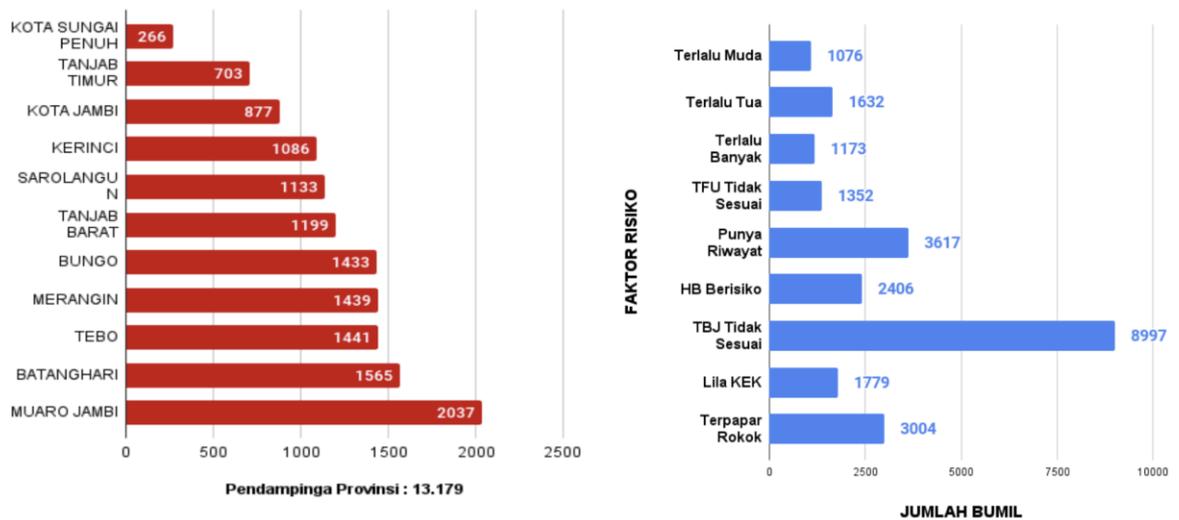
PENGANTIN PRIA BERISIKO: 1.930

- Terpapar Rokok : 663 (34,35%)
- Terlalu Muda (<25) : 1.015 (52,59%)

Grafik 4. 2 Analisis Capaian Pendampingan TPK pada Calon Pengantin

Jumlah pengantin wanita berisiko memiliki beberapa kriteria yaitu terlalu muda, terlalu tua, kurus (IMT), anemia, KEK (LILA), dan terpapar rokok. dari Catin Wanita yang berisiko sebanyak 2.189, ada 31,73% yang terpapar rokok, KEK (LILA) dengan di bawah 23,5 cm menempati urutan kedua terbesar faktor risiko dengan persentase sebesar 24,94%. Faktor risiko terendah yaitu Catin Wanita terlalu tua sebesar 3,65%. Sedangkan Calon Pengantin Pria berisiko dari jumlah 1.930, ada 1.015 atau 52,59% yang terlalu muda dan 34,35% terpapar rokok. Jika dibandingkan antara catin wanita dan pria, maka paling banyak faktor risiko terpapar rokok yaitu Catin Wanita. Hal ini menunjukkan keprihatinan bahwa Catin Wanita yang nantinya akan mengandung dan melahirkan memiliki dampak yang buruk dari terpaparnya asap rokok. Maka melalui data, diharapkan masyarakat lebih peduli terhadap pentingnya kesehatan dan menghindari asap rokok. Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi wilayah dengan Calon Pengantin Wanita berisiko terbanyak sebesar 86,02. Hal ini juga patut diperhatikan karena jika Calon Pengantin Wanita Berisiko menjadi Ibu Hamil berisiko dan melahirkan bayi stunting akan berbahaya. Maka pencegahan Catin yang berisiko harus ada pendampingan dan jangan sampai menjadi sasaran stunting.

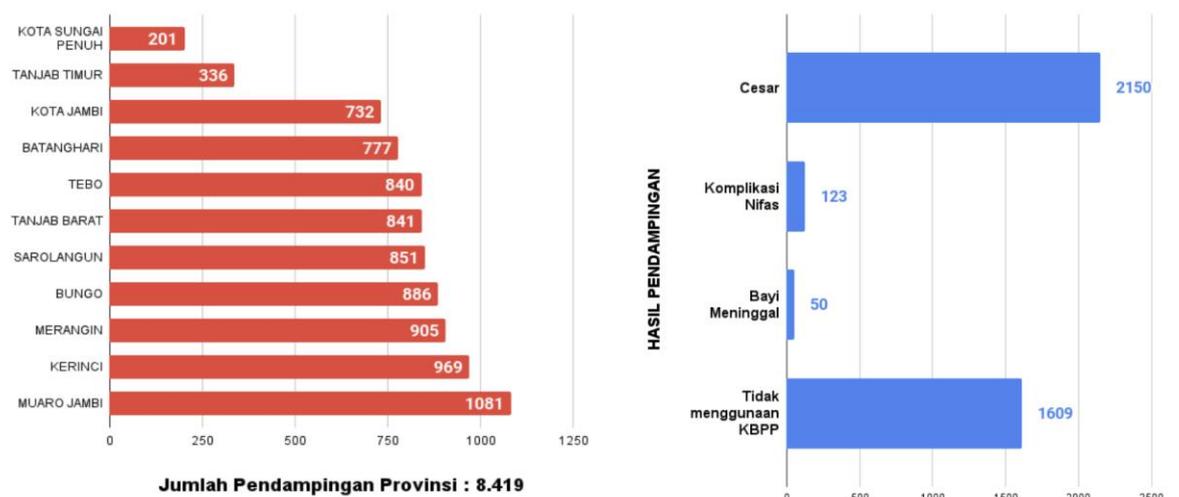
b. Pendampingan ibu hamil



Grafik 4. 3 Capaian dan Analisis Pendampingan TPK pada Ibu Hamil

Berdasarkan data tersebut, data faktor risiko yang paling banyak pada Ibu Hamil yaitu TBJ (Taksiran Berat Janin) tidak sesuai. TBJ diartikan metode untuk memprediksi berat bayi lahir. Ada sebanyak 8997 Ibu Hamil yang mengalami TBJ tidak sesuai. Selain itu faktor risiko lainnya yang terbesar yaitu memiliki riwayat sebelumnya yang kurang baik sebesar 3617, serta terpapar rokok sebanyak 3004 Ibu Hamil. Pendampingan pada ibu hamil paling sedikit di Kota Sungai Penuh sebanyak 266 pendampingan dan yang terbanyak yaitu Kabupaten Muaro Jambi sebanyak 2037 pendampingan.

c. Pendampingan ibu pascasalin

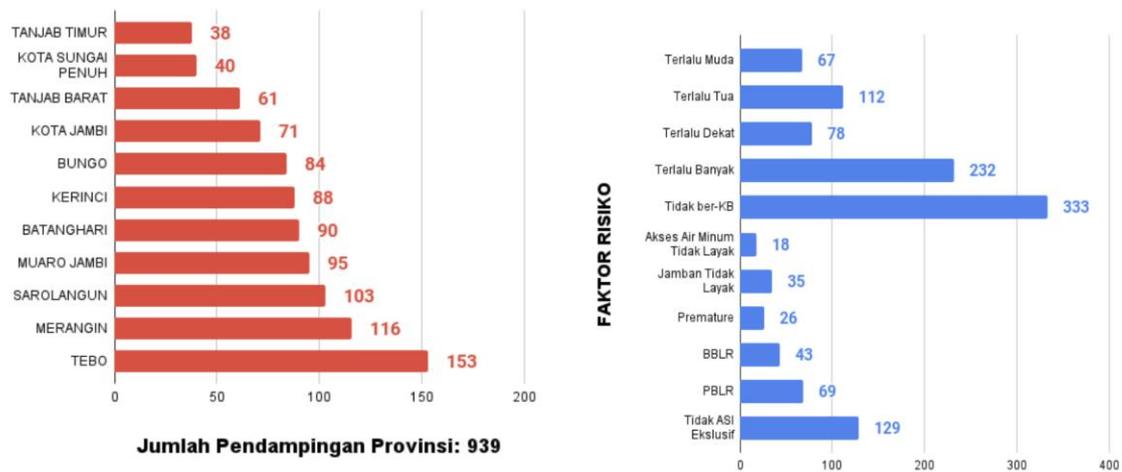


Grafik 4. 4 Capaian dan Analisis Pendampingan TPK pada Ibu Pascasalin

Dalam data pendampingan ibu pascasalin, terdapat 2150 hasil pendampingan terhadap Ibu Pasca Salin yang melakukan caesar, dan ada 1609 hasil

pendampingan yang tidak menggunakan KBPP (KB Pasca Salin). Salah satu KB yang penting untuk ibu pasca salin karena kembalinya kesuburan pada seorang ibu setelah melahirkan dan tidak dapat diprediksi dan dapat terjadi sebelum datangnya siklus menstruasi. Dari jumlah keseluruhan pendampingan Provinsi Jambi sebesar 8.419, paling sedikit yang melakukan pendampingan yaitu Kota Sungai penuh sebesar 201.

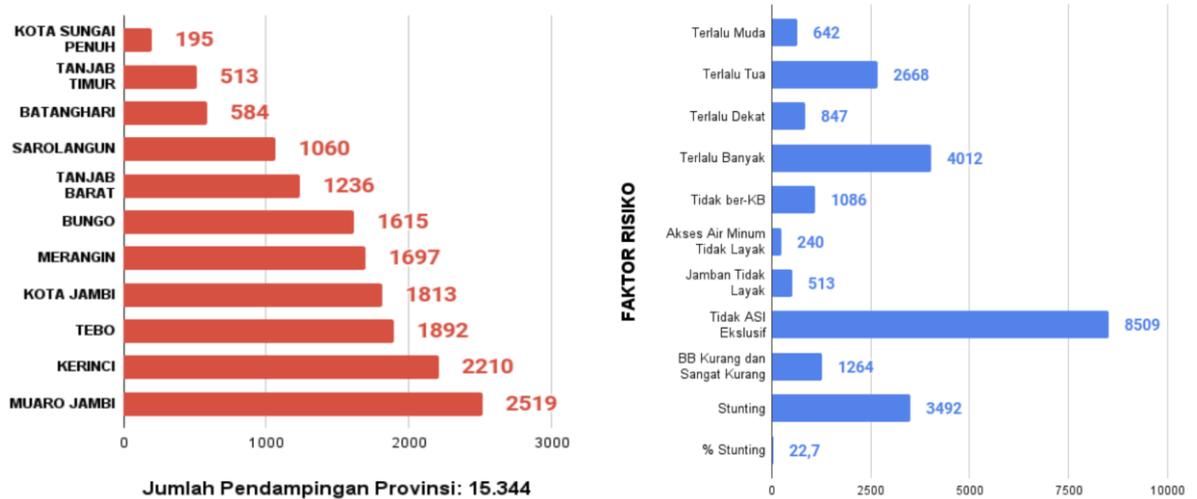
d. Pendampingan Bayi (0-28 Hari)



Grafik 4.5 Capaian dan Analisis Pendampingan TPK pada Bayi (0-28 Hari)

Pendampingan TPK pada pendampingan Bayi (0-28 hari) dilaporkan yang paling besar berada di Kabupaten Tebo dengan jumlah 153 pendampingan, kemudian Kabupaten Merangin 116 pendampingan, dan Kabupaten Sarolangun sebesar 103 pendampingan. Paling terendah berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 38 sesuai dengan pendampingan ibu pasca salin.

e. Pendampingan Baduta (>28 Hari-23 Bulan)



Grafik 4. 6 Capaian dan Analisis Pendampingan TPK pada Baduta (>28hari-23 Bulan)

Berdasarkan jumlah pendampingan pada balita, ditemukan bahwa faktor risiko yang paling banyak yaitu tidak ASI Eksklusif sebanyak 8509, dan mengalami stunting sebanyak 3492 atau 22,7%. Faktor risiko paling kecil yaitu akses air minum yang tidak layak sebesar 240.

4.4 Bapak Asuh Anak Stunting

Percepatan penurunan stunting di Provinsi Jambi mengunggulkan pelibatan lintas sektor melalui program Bapak Asuh Anak Stunting. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya 3 kebijakan dalam optimalisasi program tersebut diantaranya SE Gubernur Nomor 1813/SE/BAPPEDA-3/VII/2022 tentang Dukungan Dunia Usaha Dalam Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Jambi, Instruksi Gubernur No 7 Tahun 2023 Tentang Dukungan Lintas Sektor Dalam Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Jambi Melalui Program Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting, dan SK Gubernur Jambi Nomor 432/KEP.GUB/DISKES-2.1/2023 Tentang Penetapan Bapak Asuh Anak Stunting Pemerintah Provinsi Jambi. Total dukungan program mencapai hampir 800 juta, dengan rincian sebagai berikut.



Sumber: Pencatatan dan Pelaporan BAAS (Update:01 Juli 2023)

Grafik 4. 7 Capaian Program Bapak Asuh Anak Stunting di Provinsi Jambi

Sumber Data: Pencatatan dan Pelaporan Bapak Asuh Anak Stunting Provinsi Jambi

4.5 Aksi Konvergensi

Pelaksanaan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting telah dimandatkan melalui Peraturan Presiden 72/21 dan RAN PASTI dimana Pemerintah Kabupaten/Kota menjalankan setiap aksi yang telah ditetapkan sesuai pedoman yang diterbitkan Bangda Kemendagri RI. Capaian semester I pada aksi konvergensi adalah sebagai berikut.

Tabel 4.3 Capaian Program Aksi Konvergensi

Kabupaten/Kota	Master ANSIT	Aksi 1	Aksi 2	Aksi 3	Aksi 4	Aksi 5	Aksi 6	Aksi 7	Aksi 8
Kota Sungai Penuh	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%
Kota Jambi	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Tanjung Jabung Barat	100%	100%	50%	100%	33%	0%	0%	0%	0%
Merangin	100%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
Tanjung Jabung Timur	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Bungo	100%	100%	25%	100%	100%	0%	0%	0%	0%
Tebo	100%	100%	0%	0%	33%	0%	0%	0%	0%
Batang Hari	100%	0%	0%	66%	33%	0%	0%	0%	0%
Muaro Jambi	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Kerinci	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
Sarolangun	100%	100%	25%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Sumber: Web Aksi Bangda Kemendagri RI

Berdasarkan tabel diatas, dapat kita lihat terkait dengan penginputan master analisis situasi telah dilakukan oleh 11 Kabupaten/Kota, Aksi 1 dilaksanakan 8/11 Kabupaten/Kota, Aksi 2 telah proses di 5 Kabupaten/Kota, Aksi 3 dilaksanakan oleh 5 Kabupaten/Kota, Aksi 4 juga telah berproses di 5 Kabupaten/Kota, sedangkan Aksi 5-8 masih belum dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota.

4.6 Pemberian Makanan Tambahan (PMT)

Tabel 4. 3 Program PMT Balita Gizi Kurang dan Bumil KEK

KAB/KOTA	PMT LOKAL BUMIL KEK	PMT LOKAL BALITA GIZI KURANG	PELATIHAN TIM DAN PERSIAPAN PMT LOKAL	TOTAL
KAB. BATANGHARI	1.244.992.734	1.464.142.870	197.099.396	2.906.235.000
KAB. BUNGO	1.952.415.000	1.865.160.000	387.780.000	4.205.355.000
KAB. KERINCI	986.850.000	784.080.000	281.765.900	2.052.695.900
KAB. MERANGIN	1.951.894.250	1.985.362.000	212.598.750	4.149.855.000
KAB. MUARO JAMBI	2.062.755.000	2.269.395.000	519.245.000	4.851.395.000
KAB. SAROLANGUN	1.400.749.200	1.701.821.340	331.763.736	3.434.334.276
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	1.951.412.000	1.442.543.500	214.374.500	3.608.330.000
KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	621.135.000	1.277.100.000	132.100.000	2.030.335.000
KAB. TEBO	1.557.675.000	1.882.975.000	337.500.000	3.778.150.000
KOTA SUNGAI PENUH	421.830.000	261.269.274	157.855.726	840.955.000
JAMBI	14.151.708.184	14.933.848.984	2.772.083.008	31.857.640.176

Sumber Data: Dana BOK Non Fisik Kemenkes RI 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa terdapat anggaran PMT di 10 dari 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi pada Tahun 2023 dengan Jumlah secara keseluruhan sebesar 31.857.640.176. Anggaran ini dibagi menjadi 3 jenis menu diantaranya PMT lokal pada sasaran BUMIL KEK, PMT lokal pada sasaran BALITA gizi kurang, dan biaya pelatihan dan persiapan PMT lokal. Hingga Juni 2023 belum terlaksana realisasi anggaran karena menunggu juknis pedoman penggunaan PMT lokal dari Kementerian Kesehatan RI.

BAB V PENGANGGARAN

Penganggaran terkait dengan percepatan penurunan stunting di Provinsi Jambi dijelaskan sebagai berikut.

5.1 Penganggaran APBD Provinsi Jambi

Selain itu Pemerintah Provinsi Jambi juga mengalokasikan dukungan anggaran dalam percepatan penurunan stunting di beberapa OPD dengan total anggaran 96.422.350.717 pada tahun 2022 dan sejumlah 63.660.836.248 pada tahun 2023 yang tersebar di beberapa OPD antara lain, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1 Dukungan Anggaran Pemerintah Provinsi Jambi Dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2022 dan 2023

OPD	Jumlah Anggaran terkait PPS	
	Tahun 2022	Tahun 2023
Dinas Kesehatan	62.749.839.090,00	58.881.050.732,00
Dinas PUPR	32.018.256.390,00	1.600.000.000,00
Dinas Perikanan dan Kelautan	-	250.424.829,00
Dinas Ketahanan Pangan	1.654.255.237,00	406.959.797,00
BAPPEDA	-	2.522.400.890,00
Total	96.422.350.717,00	63.660.836.248,00

Sumber data: SIPD 2022 dan 2023

Berdasarkan tabel diatas, terdapat penurunan penganggaran percepatan penurunan stunting di APBD Provinsi Jambi Tahun 2022 dan 2023. Hal ini diakibatkan karena adanya rasionalisasi APBD Provinsi Jambi pada tahun 2023, akan tetapi BAPPEDA dan BAKEUDA tetap memprioritaskan program dan kegiatan terkait percepatan penurunan stunting untuk tidak di refocusing anggaran.

5.2 Penganggaran APBD Kabupaten Kota

Dalam rangka percepatan penurunan stunting di Kabupaten/Kota didukung melalui APBD Kabupaten/Kota masing-masing. Rincian anggaran percepatan penurunan stunting melalui APBD Kabupaten/Kota sebagai berikut.

Tabel 5. 2 Rincian Anggaran Percepatan Penurunan Stunting melalui APBD Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggaran APBD	Keterangan
1	Kerinci	4.412.795.460,00	APBD
2	Tanjung Jabung Barat	10.276.382.308,00	APBD Perubahan
3	Merangin	1.483.838.631.885,00	APBD Perubahan
4	Tanjung Jabung Timur	3.917.443.822,00	APBD Perubahan
5	Tebo	4.681.375.770,00	KUA PPAS
6	Kota Jambi	9.765.759.372,00	APBD Perubahan
7	Bungo	27.892.262.330,00	APBD Perubahan
8	Batang Hari	36.115.039.083,00	APBD Perubahan
9	Sarolangun	42.755.541.978,00	APBD Perubahan
10	Muaro Jambi	4.975.267.600,00	KUA PPAS
11	Kota Sungai Penuh	8.346.800.097,00	APBD
TOTAL		1.636.977.299.705,00	Aksi Bangsa

Sumber: Web Aksi Bangsa Kemendagri RI

Berdasarkan tabel diatas, seluruh Kabupaten/Kota telah berkomitmen dalam percepatan penurunan stunting dengan melaksanakan perencanaan anggaran kegiatan program PPS. Anggaran secara keseluruhan sebesar 1,6 triliun, dengan anggaran tertinggi berada di Kabupaten Merangin hampir 1,5 triliun dan terendah di Kabupaten Kerinci 4,4 miliar rupiah.

5.3 Dukungan Kebijakan

Dalam rangka percepatan penurunan stunting di Provinsi Jambi terdapat beberapa dukungan kebijakan dari Pemerintah Provinsi Jambi, diantaranya sebagai berikut.

1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, dgn Visi “Jambi Mantap” Penurunan Prevalensi Stunting 14% (2023) dan 12% (2024)

2. SE Gubernur Nomor 156/DP3AP2-5/III/2021 tentang Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting
3. SK Gubernur Nomor 362/Kep.GUB/BAPPEDA-3/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jambi
4. Surat Gubernur Nomor S-050/1684/BAPPEDA-3.2/VI/2022 tentang Penetapan Target Penurunan Stunting Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota
5. SE Gubernur Nomor 1813/SE/BAPPEDA-3/VII/2022 tentang Dukungan Dunia Usaha Dalam Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Jambi
6. SE Gubernur Jambi Nomor 2686/SE/SETDA.KESRA-3.1/IX/2022 tentang Dukungan Percepatan Penurunan Stunting pada Anak Usia Dini dan Remaja
7. SE Gubernur Nomor 213/SE/BAPPEDA-3/II/2023 tentang Dukungan Optimalisasi Pelaksanaan Surveilans Gizi Dalam Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Jambi
8. SE Gubernur Nomor 100/SE/DP3AP2/II/2023 tentang Dukungan Kampanye Perubahan Perilaku dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Jambi
9. Instruksi Gubernur No 7 Tahun 2023 Tentang Dukungan Lintas Sektor Dalam Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Jambi Melalui Program Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting
10. SK Gubernur Jambi Nomor 432/KEP.GUB/DISKES-2.1/2023 Tentang Penetapan Bapak Asuh Anak Stunting Pemerintah Provinsi Jambi
11. SE Gubernur Jambi Nomor 1164/SE/SETDA.KESRA-3.1/VI/2023 tentang Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan (KBPP) dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Jambi
12. SK Gubernur Nomor 255/KEP.GUB/BAPPEDA-3/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 362/KEP.GUB/BAPPEDA-3/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jambi
13. Surat Dukungan Percepatan Penurunan Stunting oleh Kementerian Agama Provinsi Jambi Nomor 5288/Kw.05.5/3/PW.00/09/2022 Tanggal 27 September 2022 perihal Himbauan Pemanfaatan ELSIMIL dalam Percepatan Penurunan Stunting
14. Surat Dukungan Percepatan Penurunan Stunting oleh Dinas P3AP2 Provinsi Jambi Nomor UND-415/DP3AP2-5.1/X/2022 Tanggal 13 Oktober 2022 Perihal Himbauan Percepatan Penurunan Stunting.
15. Surat Dukungan Percepatan Penurunan Stunting oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Nomor S.1834/Diskes 2.1/IX/2022 Tanggal 29 September 2022 Perihal Himbauan Percepatan Penurunan Stunting.

BAB VI INOVASI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Dalam proses pelaksanaan percepatan penurunan stunting di Provinsi Jambi terdapat beberapa kegiatan dan program yang dilaksanakan diseluruh Kabupaten/Kota, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 6.1 Inovasi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi

No	Nama Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Sasaran	Ouput Kegiatan	Intansi Pelaksana	Tingkat Pelaksanaan	KAB/KOTA	DOKUMENTASI
1	Ayah Bunda Asuh Anak Stunting	Bantuan Pemberian PMT	Balita Stunting	Peningkatan Gizi Balita Stunting	PKK	Kabupaten	BATANGHARI	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1AJ7Nllyf6g6F-NRt5TtkSdmISm1WeEAJ
2	TAS (Telur Anak Stunting)	Pemberian telur dan sembako	Balita Stunting	Peningkatan Gizi Balita Stunting	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Kabupaten	BATANGHARI	
3	Dokter Tangguh	Melayani sasaran bumil,bufas dan balita yang tidak terakses ke puskesmas	bumil,bufas dan balita	Edukasi, pemeriksaan ibu hamil dan balita	Dinkes	Kabupaten	BATANGHARI	

No	Nama Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Sasaran	Ouput Kegiatan	Intansi Pelaksana	Tingkat Pelaksanaan	KAB/KOTA	DOKUMENTASI
4	Motivator Tangguh	Edukasi jemput bola dengan pemberian KIE pencegahan dan penanggulangan stunting serta kesehatan reproduksi	Catin, Bumil, Balita	Peningkatan pengetahuan kesehatan dan kunjungan posyandu	DPKBP3A	Kabupaten	BATANGHARI	

No	Nama Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Sasaran	Ouput Kegiatan	Intansi Pelaksana	Tingkat Pelaksanaan	KAB/KOTA	DOKUMENTASI
5	BU ACTING (Bungo Aksi Cegah Stunting)	Kegiatan interaksi dari TPPS Kabupaten dan TPPS Kecamatan serta desa salah satunya mempermudah komunikasi antar pimpinan dimana salah satu agendanya adalah pertemuan ketua TPPS di kecamatan dan mendengarkan saran serta permasalahan yang dihadapi oleh TPPS Kecamatan dan Desa	TPPS Kecamatan, TPPS Desa & TPK	program dan kegiatan yang dilakukan oleh TPPS Kecamatan dan TPPS Desa tersampaikan kepada TPPS Kabupaten serta mengetahui hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan stunting	Dinsosp2kb p3a	Kecamatan	BUNGO	https://drive.google.com/drive/u/2/foIders/1AJ7Nllyf6q6F-NRt5TtkSdmlSm1WeEAJ

No	Nama Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Sasaran	Ouput Kegiatan	Intansi Pelaksana	Tingkat Pelaksanaan	KAB/KOTA	DOKUMENTASI
6	HALODO Ks LIDIA (Asuh Stunting Konsultasi Dokter Serta Layanan Intervensi dan Obati Anak Stunting)	salah satu bentuk inovasi yang dilakukan yaitu dengan kartu biru yaitu kartu bungo sehat (KBS) dimana diperuntukan untuk balita stunting yang tidak memiliki akses BPJS Kesehatan	Balita Stunting	Terciptanya layanan kepada balit stunting yang tidak memiliki akses kartu BPJS dan dilakukan rujukan kepada dokter spesialis anak	Dinas Kesehatan	Kabupaten	BUNGO	

No	Nama Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Sasaran	Ouput Kegiatan	Intansi Pelaksana	Tingkat Pelaksanaan	KAB/KOTA	DOKUMENTASI
7	SAFARI STUNTIN G	Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan Pemeriksaan Kesehatan Balita Stunting, Gizi Kurang, Gizi Buruk, Ibu Hamil Beresiko Stunting dan Calon Pengantin Beresiko Stunting diseluruh Wilayah Kerja Puskesmas untuk di lakukan tindak lanjut sesuai kebutuhan	Balita Stunting, Gizi Kurang, Gizi Buruk, Ibu Hamil Beresiko Stunting dan Calon Pengantin Beresiko Stunting	Ketersediaan Data Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Jambi	Dinas Kesehatan dan KB	Kabupaten	TEBO	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1JronRUQetIHGlt2Fh07MozClTAHDt7g

No	Nama Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Sasaran	Ouput Kegiatan	Intansi Pelaksana	Tingkat Pelaksanaan	KAB/KOTA	DOKUMENTASI
8	Dashat (dapur stunting atasi stunting)	kegiatan yang dilakukan oleh desa dengan mengolah bahan pangan lokal yang sudah di masak untuk di berikan ke sasaran penerima makanan sehat	Balita stunting, bayi kurang gizi dan ibu hamil	ketersediaan data sasaran oenerima untuk kegiatan persepatan penurunan stunting	desa dan kader TPK	Desa	MUARO JAMBI	https://drive.google.com/drive/u/2/foIders/1y29tVriz_Fwn_lhGMTuuYDjMkylC8iDR
9	Catring (kelas atasi stunting)	pengolahan bahan lokal berupa daun kelor yang diolah menjadi panganan sehat berupa biskuit	Balita stunting, bayi kurang gizi dan ibu hamil	adanya variasi makanan sehat yang berbahan lokal desa dengan memiliki nilai gizi yang baik	ahli gizi, kader TPK, desa	Desa	MUARO JAMBI	

No	Nama Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Sasaran	Ouput Kegiatan	Intansi Pelaksana	Tingkat Pelaksanaan	KAB/KOTA	DOKUMENTASI
10	SPOg dan SPaGoes to Puskesmas	Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberian layanan kesehatan oleh tenaga medis dimana dokter turun ke desa dan memberikan layanan kesehatan di puskesmas	Balita stunting, bayi kurang gizi dan ibu hamil	Semua sasaran dapat dilayanan oleh tenaga kesehatan /dokter ke desa dan memantau langsung	Dokter, dinas kesehatan	Kabupaten	MUARO JAMBI	
11	Warung Stunting (warung atasi stunting)	kegiatan ini berupa penyediaan bahan pangan yang di sediakan warung untuk di berikan kepada sasaran penerima manfaat	Anak stunting, balita gizi kurang, ibu hamil	tersedianya data penerima manfaatdari warung stunting	ahli gizi, kader TPK, desa	Desa	MUARO JAMBI	

No	Nama Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Sasaran	Ouput Kegiatan	Intansi Pelaksana	Tingkat Pelaksanaan	KAB/KOTA	DOKUMENTASI
12	Apel DE BEST 1000 HPK	Kegiatan ini bertujuan penyelamatan desa bebas stunting 1000 HPK (APEL DE BEST)	Balita stunting, bayi kurang gizi dan ibu hamil	tersedianya data penerima manfaatarung stunting	Kader TPK, desa	Desa	MUARO JAMBI	
13	Bantuan ASuh Anak Stunting (BAAS)	pemberian bantuan berupa paket bahan pangan sehat berupa susu, telur, kacang hijau, dll yang di distribusikan kepada anak stuning, ibu hami	Balita stunting, bayi kurang gizi dan ibu hamil	adanya data terpilih sebagai penerima bantuan	Semua OPD, CSR< Per Bank an, indiviu, Donatur dll	Kabupaten	MUARO JAMBI	

No	Nama Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Sasaran	Ouput Kegiatan	Intansi Pelaksana	Tingkat Pelaksanaan	KAB/KOTA	DOKUMENTASI
14	Sikomo (sistem Informasi dan komikasi obstetri	Inovasi berbentuk aplikasi ini bertujuan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Jambi. Keunikan Aplikasi ini adalah :1). Ibu Hamil bisa memilih faskes untuk pemeriksaan kehamilan dan persalinan 2). Ibu Hamil bisa konsultasi via chat dalam aplikasi 3).Data Kesehatan Ibu Hamil, Ibu Bersalin, dan Ibu Nifas tercatat di aplikasi sehingga petugas Kesehatan dapat	Ibu Hamil	Ketersediaan Data Ibu Hamil	Dinkes	Kecamatan dan Kelurahan	KOTA JAMBI	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/15dOXsLMqJYBHxW4b6kugu-3l1rbzl_QA

No	Nama Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Sasaran	Ouput Kegiatan	Intansi Pelaksana	Tingkat Pelaksanaan	KAB/KOTA	DOKUMENTASI
		mengakses data dengan mudah 4). Dapat mengidentifikasi resiko tinggi selama kehamilan						

No	Nama Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Sasaran	Ouput Kegiatan	Intansi Pelaksana	Tingkat Pelaksanaan	KAB/KOTA	DOKUMENTASI
15	Kampung Bantar (Bersih, Aman, dan Pintar)	inovasi yang bertujuan untuk : 1). Mengakselerasi percepatan pembangunan 2). Mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah 3). Meningkatkan kualitas kesejahteraan dan meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat di tingkat RT 4). Menumbuhkan kembali semangat jiwa gotong royong masyarakat	Masyarakat	Lingkungan bersih dan masyarakat sejahtera	DPMPPA	Kecamatan, kelurahan	KOTA JAMBI	

No	Nama Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Sasaran	Ouput Kegiatan	Intansi Pelaksana	Tingkat Pelaksanaan	KAB/KOTA	DOKUMENTASI
16	Sarana Pelayanan Inovatif dengan Ramah Anak (SPIDERMAN)	Kegiatan Pokok Spiderman sebagai berikut : 1). Pelayanan MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit) 2). Pelayanan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) pada Bayi/Balita 3). Penjaringan MuriD SD, SMP dan SMA 4). SDIDTK ke TK dan PAUD 5). Kelas Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Berkualitas	Masyarakat dan sekolah	pemberian edukasi pada ortua tentang tumbuh kembang anak	Puskesmas Tanjung Pinang	Kecamatan	KOTA JAMBI	

No	Nama Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Sasaran	Ouput Kegiatan	Intansi Pelaksana	Tingkat Pelaksanaan	KAB/KOTA	DOKUMENTASI
		6)Pertemuan Kelas Ibu Balita						

No	Nama Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Sasaran	Ouput Kegiatan	Intansi Pelaksana	Tingkat Pelaksanaan	KAB/KOTA	DOKUMENTASI
17	TELUSURI (TELUR SUSU DAN ROTI)	Inovasi kegiatan ini berbentuk pemberian makanan tambahan untuk balita Stunting, dimana sasaran balita Stunting tersebut di berikan bantuan PMT selama 6 bulan dan di pantau perkembangan anak tersebut.	Balita Stunting	untuk meningkatkan status gizi anak serta untuk mencukupi kebutuhan zat gizi anak agar tercapainya status gizi dan kondisi gizi yang baik sesuai dengan umur anak tersebut.	TPPS Kabupaten Sarolangun	Kabupaten	SAROLANGUN	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1mpyG6duRGrEF5z5MVmYTWZhFNau7DY74

No	Nama Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Sasaran	Ouput Kegiatan	Intansi Pelaksana	Tingkat Pelaksanaan	KAB/KOTA	DOKUMENTASI
18	KECETIN G (Kelas Cegah Stunting)	Pusat informasi dan edukasi masyarakat yang bertujuan untuk memberi pemahaman, pembelajaran dan informasi dini kepada masyarakat tentang pencegahan stunting dan sebagai pusat informasi data, informasi resiko stunting, dan langkah penanganannya	OPD/Intansi, Data Catin, Ibu Hamil, Baduta, Balita, Posyandu, TPK, dan Kader Desa	Pembalajaran, Sosialisasi, dan Koordinasi Pencegahan, dan Percepatan Penurunan Stunting, Ketersediaan Data Percepatan Penurunan Stunting di Tingkat Desa	TPK, Kader Posyandu, dan Kader PKK	Desa	KERINCI	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1esUdFLL9zaMAIRb1GOkX8z1RzMNL7YnH

No	Nama Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Sasaran	Ouput Kegiatan	Intansi Pelaksana	Tingkat Pelaksanaan	KAB/KOTA	DOKUMENTASI
19	RT ISTIMEWA (Rukun Tetangga Ikut Serta Mengawasi Kesehatan Wanita dan Anak)	Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan koordinasi dan fasilitasi serta intervensi langsung melalui kerja sama dengan PKK dan Ibu Pemilik Warung dimana Para Pelaku dilapangan mengintervensi sasaran dengan mencatat temuan kasus terhadap catin, ibu hamil, pasca salin, dan baduta/balita, dan memastikan kebenaran data dan kasus yang di	Catin, Ibu Hamil, Ibu Pasca Salin, Baduta/Balita	Data Kasus Catin, Ibu Hamil, Ibu Pasca Salin, Baduta/Balita yang teridentifikasi berisiko Stunting	Puskesmas dan Kader RT Istimewa	Desa	KERINCI	

No	Nama Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Sasaran	Ouput Kegiatan	Intansi Pelaksana	Tingkat Pelaksanaan	KAB/KOTA	DOKUMENTASI
		temukan, dan melaporkan hasil temuan kasus kepada bidan desa dan puskesmas diwilayah kerja kecamatan.						

No	Nama Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Sasaran	Ouput Kegiatan	Intansi Pelaksana	Tingkat Pelaksanaan	KAB/KOTA	DOKUMENTASI
20	KOPASUS (KOMunitas Pak-bapak penduku ng ASi ekSkluif)	Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan kampanye pemberian ASI Eksklusif	OPD/Intansi, Data, Ibu Hamil, Baduta, Balita, Posyandu, Kader,	Tersedianya data peningkatan bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif	Puskesmas Sungai Penuh	Kecamatan	SUNGAI PENUH	https://drive.google.com/drive/u/2/foIders/1dLnEglAD9RiHQwVRGo3gv5sV3zZWWsG
21	TELUKMISSA PENTING (Telusur Keluarga Miskin Desa untuk Pencegahan Stunting)	Salah satu inovasi di Kabupaten Merangin untuk penelusuran dan pemadanan data Keluarga Miskin dengan Keluarga Beresiko Stunting dan Balita Stunting agar tepat dalam pemberian bantuan sosial	OPD/Intansi, Desa, Kecamatan, Data, Ibu Hamil, Baduta, Balita	Data pemadanan Keluarga Miskin dengan Keluarga Beresiko Stunting dan Balita Stunting	DPPKB, DINKES, DINSOS, PMD, BAPPEDA	Kabupaten	MERANGIN	https://drive.google.com/drive/u/2/foIders/1y9lt3TSfaDXEJP_OEnyQL899_bkYhOdR

No	Nama Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Sasaran	Ouput Kegiatan	Intansi Pelaksana	Tingkat Pelaksanaan	KAB/KOTA	DOKUMENTASI
22	CENTAN G (Celengan Untuk Anak Stunting)	Merupakan Inovasi yang bertujuan untuk membantu anak stunting dalam bentuk PMT melalui donasi di Instansi dan OPD	Ibu Hamil, Baduta, Balita	Peningkatan status gizi anak stunting	OPD	Kabupaten	MERANGIN	
23	Jum'at 2000 Berkah	Salah satu inovasi yg di gagas oleh Kecamatan Bangko, Puakesmas Bangko, Balai Penyuluh KB,Desa/Kelurahan kegiatan tersebut dalam bentuk donasi dan pemberian PMT serta Jaminan Kesehatan (JKN)	Balita Stunting dan Keluarga Beresiko Stunting	Balita Stunting Mendapatkan JKN gratis dari Puskesmas Bangko dan Pemberian PMT pada Balita Stunting dan Keluarga Beresiko Stunting di	Kecamatan, Puskesmas, Balai PKB, Desa/Kelurahan	Kecamatan	MERANGIN	

No	Nama Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Sasaran	Ouput Kegiatan	Intansi Pelaksana	Tingkat Pelaksanaan	KAB/KOTA	DOKUMENTASI
				Desa dan Kelurahan				

No	Nama Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Sasaran	Ouput Kegiatan	Intansi Pelaksana	Tingkat Pelaksanaan	KAB/KOTA	DOKUMENTASI
24	JASS BERKAH (JEMPUT ANAK STUNTIN G SEMOG A BERKAH	Penanganan anak stunting dengan membawa/menje mput anak stunting yang kemudian diperiksa ke Dokter Spesialis kemudian di intervensi sesuai rekomendasi dokter. Perkembangan anak Stunting di pantau oleh Puskesmas terdekat	Baduta/Bali ta Stunting	Anak Stunting Terintervensi	Dinkes, Rumah Sakit KD. Daud Arif, RS. Surya Khairudin, Puskesmas	Kabupaten dan Kecamatan	TANJAB BARAT	https://drive.google.com/drive/u/2/fo lders/1Pq2DFRx6 fyjhVuXlluERCRJ hINCYxO9H

No	Nama Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Sasaran	Ouput Kegiatan	Intansi Pelaksana	Tingkat Pelaksanaan	KAB/KOTA	DOKUMENTASI
25	Safari Subuh dan Safari Jum'at	Kegiatan rutin yang dilakukan Bupati terkait juga dengan status beliau sebagai seorang muballigh. Pada waktu khultum, Bupati selalu menyampaikan KIE tentang penolakan pernikahan dini/anak, pola asuh yang baik dan kebersihan lingkungan sebagai beberapa faktor penyebab stunting. Juga ada pemberian sembako bagi KRS pada setiap kesempatan	Keluarga Beresiko Stunting	KIE Stunting tersampaikan dan masyarakat terpapar faktor penyebab stunting	Bupati, Prokopim	Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Mesjid	TANJAB BARAT	

No	Nama Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Sasaran	Ouput Kegiatan	Intansi Pelaksana	Tingkat Pelaksanaan	KAB/KOTA	DOKUMENTASI
26	Biskuit Iga Datuk	Pengolahan Pangan Lokal dari Bahan Ikan Gabus dan Daun Katuk yang diolah sedemikian rupa sehingga berbentuk biskuit yang menarik untuk dikonsumsi Baduta dan Balita dan mempunyai kandungan gizi yang tinggi.	Baduta, Balita	Baduta & Balita Kurang Gizi ataupun Stunting memperoleh tambahan gizi dari Biskuit Iga Datuk ini.	Puskesmas, Kader Posyandu dan Kader PKK	Desa	TANJAB TIMUR	

No	Nama Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Sasaran	Ouput Kegiatan	Intansi Pelaksana	Tingkat Pelaksanaan	KAB/KOTA	DOKUMENTASI
27	GemPar Akting	Gerakan Memanfaatkan Pekarangan Rumah Atas Kasus Stunting (Gempar Akting) dengan menanam sayuran di pekarangan rumah yang bisa dipergunakan untuk konsumsi harian rumah tangga dan juga memelihara ikan lele, nila, gabus, di pinggir rumah dengan membuat tambak kecil sehingga hasil ikan bisa dipanen untuk makan sehari-hari.	Keluarga Beresiko Stunting (KRS)	KRS bisa memanfaatkan pekarangan rumah untuk mencukupi kebutuhan sayuran dan ikan demi menjaga asupan gizi yang baik untuk keluarganya	PKK Desa	Desa	TANJAB TIMUR	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1splvdqiYP6MMmTxJlg8PYv2u_trDqtK0

No	Nama Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Sasaran	Ouput Kegiatan	Intansi Pelaksana	Tingkat Pelaksanaan	KAB/KOTA	DOKUMENTASI
28	Arisan Telur	Arisan Telur di kegiatan Ibu-Ibu Dasawisma, dimana satu ibu membawa 2 telur mentah dan setelah dapat maka yang bersangkutan boleh mengambil telur tersebut atau menyumbangkan kepada Balita Stunting atau Ibu Hamil KEK Anemia atau untuk Keluarga Beresiko Stunting.	Balita stunting, Ibu Hamil, dan KRS	Telur hasil arisan tersebut bisa dikonsumsi oleh keluarga yang sangat membutuhkan lauk pauk untuk mencukupi protein yang dikonsumsi oleh Balita ataupun Ibu Hamil tersebut.	PKK Desa	Desa	TANJAB TIMUR	

BAB VII PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Percepatan penurunan Stunting perlu dilakukan untuk menjamin generasi kita dimasa depan menjadi generasi yang potensial yang membawa bangsa ini kepada kemajuan yang lebih baik. Oleh karena itu diperlukan kerjasama yang lebih besar atau yang disebut konvergensi agar menjaga, mengendalikan serta mencegah sehingga potensi status gizinya berubah akibat dari tata kelola yang salah proses pemenuhan serta asuhan yang tidak tepat.

Upaya Percepatan Penurunan Stunting perlu dilakukan secara timbal balik melalui hubungan secara vertikal maupun horizontal, yaitu melalui pemerintah maupun tanggung jawab bersama antar masyarakat. Peran semua stakeholders sangat penting untuk mendorong percepatan penurunan stunting dengan berbagai program dan kegiatan yang tepat sasaran sehingga pemenuhan gizi menjadi lebih baik, pola asuh lebih terarah sehingga menjamin generasi menjadi lebih berkualitas di masa depan dan inilah aset yang perlu kita rawat.

Demikian laporan singkat ini disusun sebagai gambaran pelaksanaan percepatan penurunan stunting di Provinsi Jambi Semester I (Januari-Juni) Tahun 2023.

7.2 Rekomendasi

Dalam pelaksanaan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Jambi dibutuhkan dukungan beberapa hal sebagai berikut.

1. Memastikan capaian indikator yang belum tercapai dapat dioptimalkan pada semester kedua Tahun 2023.
2. Memastikan peningkatan anggaran perencanaan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting 2024.
3. Memastikan pelayanan kepada Balita Kasus Stunting dan Keluarga Berisiko Stunting terpenuhi dengan tepat sasaran dan tepat layanan kebutuhan.
4. Optimalisasi program pendampingan kepada Calon Pengantin, Ibu Hamil, Ibu Pascasalin, dan Keluarga Balita.
5. Peningkatan kampanye perubahan perilaku kepada masyarakat terkait dengan pencegahan dan penanggulangan stunting yang baik dan efektif.
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat Pemantauan Pertumbuhan bayi balita dengan melibatkan peran lintas sektor dalam menggerakkan masyarakat ke Posyandu.
7. Memastikan terwujudnya 3 standar pasti pada Posyandu (SDM terlatih, alat terstandar, dan pelaksanaan SOP sesuai standar)

8. Peningkatan program Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting dengan melibatkan seluruh lintas sektor.
9. Pemanfaatan dan Integrasi Data Stunting sebagai dasar penentuan kebijakan dan sasaran pelayanan intervensi.
10. Pengawasan program pemberian makanan tambahan (PMT) yang baik kepada ibu hamil dan balita.
11. Peningkatan ekonomi keluarga dalam rangka kemandirian pemenuhan kebutuhan gizi keluarga dalam rangka percepatan penurunan stunting.
12. Optimalisasi peran dan fungsi seluruh lini lapangan dalam percepatan penurunan stunting (Kader, KPM, TPK, PKK, dan lainnya)
13. Meningkatkan cakupan ketersediaan dan akses sanitasi dan air minum yang layak.
14. Memastikan berjalannya manajemen dan tatalaksana penanganan kepada balita stunting atau memiliki risiko stunting, serta ibu hamil KEK.
15. Tingkatkan inovasi lokal dalam rangka percepatan penurunan stunting